



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.4. Latar Belakang	1
1.4. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.4. Hubungan Antar Dokumen RKPD	6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	26
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	44
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	57
2.5. Evaluasi Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026	64
2.6. Permasalahan Pembangunan	64
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	66
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	66
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	71
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	78
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	78
4.2. Prioritas Pembangunan	79
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	92
5.1. Rencana Kerja	92
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	159
BAB VII PENUTUP	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Raja Ampat	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Raja Ampat	11
Gambar 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	15
Gambar 2.3. Grafik Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Raja Ampat	17
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	20
Gambar 2.5. Piramida Penduduk Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	22
Gambar 2.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 (ribu jiwa).....	24
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	26
Gambar 2.8 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	27
Gambar 2.9 Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023-2024	29
Gambar 2.10 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	30
Gambar 2.11 Grafik Indeks Gini Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.12 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024 (UHH 2020)	32
Gambar 2.13 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024. Hasil Long Form SP2020	33
Gambar 2.14 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	34
Gambar 2.15 Rata-Rata Lama Sekola Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022-2024	36
Gambar 2. 16 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022-2024	37
Gambar 2.17. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023-2024	39

Gambar 2.18. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024	41
Gambar 2.19. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024	42
Gambar 2.20. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024	42
Gambar 2.21. Grafik Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	46
Gambar 2.22. Grafik Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	47
Gambar 2. 23. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2024 (Persen)	48
Gambar 2.24. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024 (Nilai)	51
Gambar 2.25. Panjang jalan menurut kewenangan kabupaten di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	54
Gambar 2.26. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024 (km)	55
Gambar 2.27. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024 (km).....	56
Gambar 2.28. Grafik Inflasi Kota Sorong Tahun 2020-2024	57
Gambar 2.29. Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Raja Ampat 2024 ...	61
Gambar 2.30. Skor Indeks Daya Saing Daerah.....	62
Gambar 2.31. Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023-2024	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Potensi unggulan dan arah pengembangan kewilayahan menurut kluster di Kabupaten Raja Ampat	12
Tabel 2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, 2022	16
Tabel 2.3 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Raja Ampat, 2023	18
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	21
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)	25
Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan Kabupaten raja Ampat Tahun 2023-2024	35
Tabel 2.8. Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024	43
Tabel 2.10 Distribusi PDRB Non-Pertambangan dan Penggalian Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	49
Tabel 2.11. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Raja Ampat (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.12. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Raja Ampat (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	53
Tabel 2.13. Jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Kepolisian Sektor di Raja Ampat	60
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024	64
Tabel 4.1. Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029	82
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026	82
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	85
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029.....	86
Tabel 5.1. Keselarasan Program Unggulan Kabupaten Raja Ampat dengan Program Prioritas Provinsi Papua Barat Daya	96
Tabel 5.2. Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN	96

Tabel 5.1. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026	102
Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029.

Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2026 dimana RKPD tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Raja Ampat yaitu "***Raja Ampat Sebagai Kabupaten Bahari yang Sejahtera, Adil, Maju, dan Berkelanjutan***" dan kebijakan periode pertama Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada serentak tahun 2024 melalui visi dan misi yang tertuang RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 yang diarahkan pada "***Memperkuat fondasi transformasi pembangunan***".

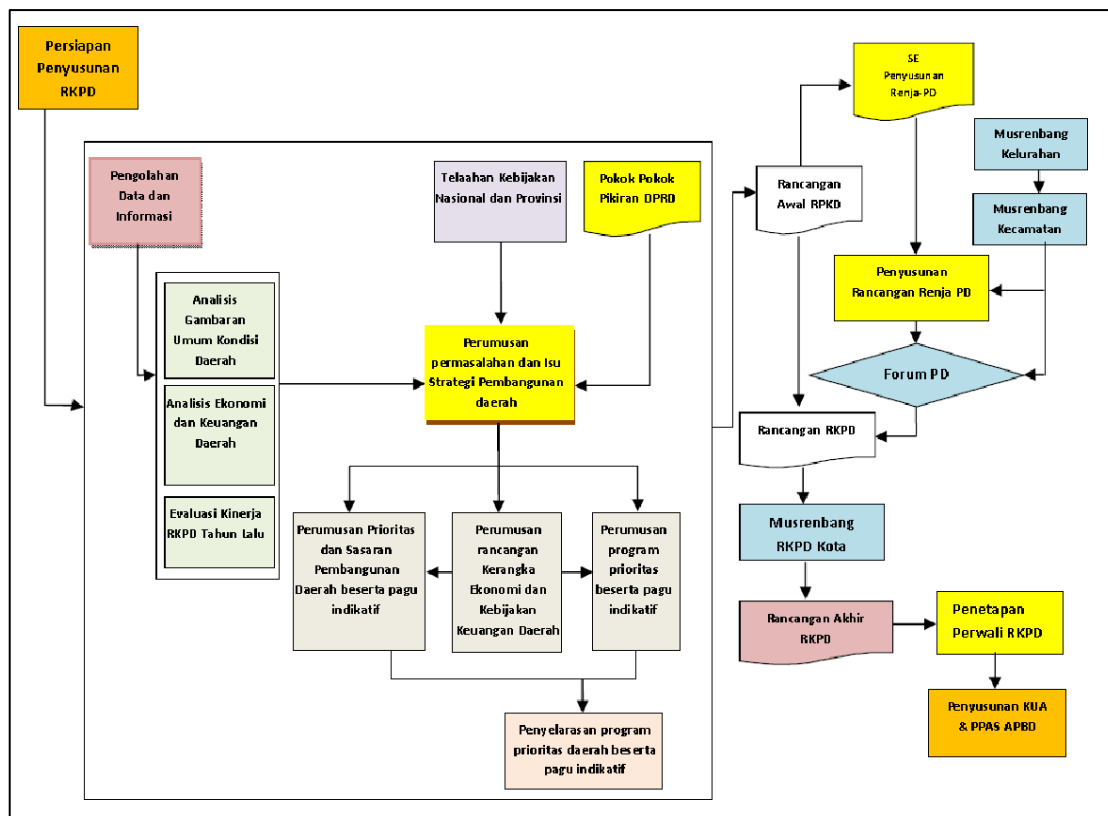
Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu

tahun;

2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut



Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026

1.4. **Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045;
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus

Provinsi Papua;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RT/RW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kalurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rincian Alokasi TKD Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Kabupaten Raja Ampat Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya dan RPJPN.

2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029

RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

4. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

5. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Raja Ampat sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

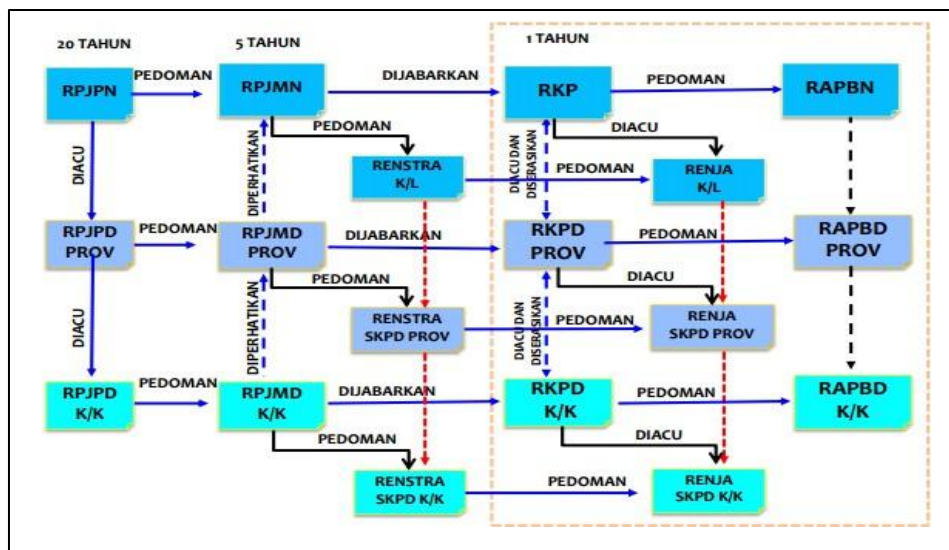
7. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana

SPM.

8. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.



Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Raja Ampat

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- 2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2045;

- 3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 bertujuan untuk :

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026

RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di Kabupaten Raja Ampat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024, keterkaitannya dengan RPJPD dan teknokratik RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

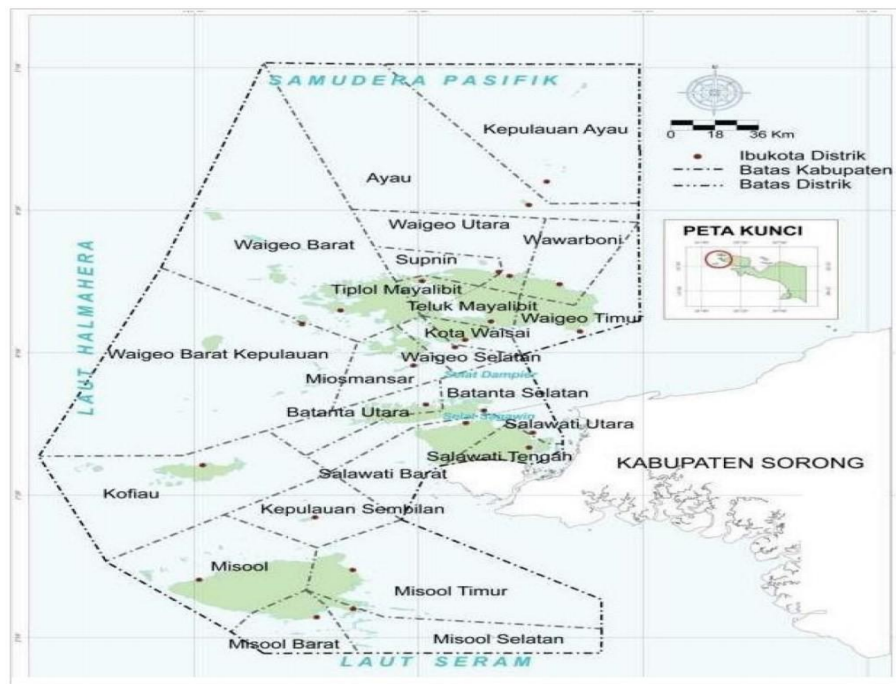
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan Ibukota di Waisai. Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam wilayah adat Domberai. Secara geografis, Kabupaten Raja Ampat terletak di antara 0°45" Lintang Utara - 2°15" Lintang Selatan dan 24°00" - 132°00" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Raja Ampat berdasarkan data BPS Kabupaten Raja Ampat seluas 71.605,66 km² dimana wilayah daratan seluas 6.084,50 km² sementara wilayah laut seluas 65.521,16 km². Distrik dengan wilayah terluas baik wilayah darat maupun laut adalah Distrik Waigeo Barat dengan luas 6.456,06 km² sedangkan distrik dengan wilayah terkecil adalah Distrik Tiplol Mayalibit yaitu seluas 268,88 km².

Pada awal pembentukan, Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 7 distrik, dan pada tahun 2010 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010, wilayah Kabupaten Raja Ampat terdiri atas 24 distrik, 4 kelurahan, dan 117 kampung. Batas wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Republik Federal Palau dan Samudera Pasifik
- Sebelah selatan : Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku
- Sebelah barat : Kota Sorong dan Kabupaten Sorong
- Sebelah timur : Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Raja Ampat 2011-2030

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Raja Ampat

Secara geo-ekonomis dan geo-politik, Kabupaten Raja Ampat memiliki peranan penting sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri. Pulau Fani yang dikenal sebagai habitat ikan karang adalah pulau kecil terluar yang terletak di ujung paling utara dari rangkaian Kepulauan Raja Ampat berbatasan langsung dengan Republik Palau. Adapun letak Kabupaten Raja Ampat dalam konteks keanekaragaman hayati memiliki posisi strategis. Hal ini disebabkan Kabupaten Raja Ampat terletak di pusat segitiga karang dunia (coral triangle) dan merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Lebih lanjut lagi, Kabupaten Raja Ampat memiliki berbagai jenis kekayaan laut berupa 1.104 jenis spesies ikan, 666 jenis spesies moluska, dan 537 spesies hewan karang. Dengan kekayaan sumberdaya laut yang tinggi, Kabupaten Raja Ampat memiliki berbagai jenis ekosistem yang mendukung tumbuh hidupnya berbagai biota laut diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Raja Ampat sebagai kepulauan memiliki perbandingan wilayah darat dan laut sebesar satu banding enam, dengan wilayah perairan yang lebih dominan. Persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Raja Ampat dalam mengembangkan wilayahnya adalah keterbatasan ruang di darat maupun laut. Keterbatasan muncul karena sebagian besar (lebih dari 80%) merupakan kawasan

lindung (kawasan lindung laut maupun kawasan lindung darat). Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG sebanyak 0,4. Adapun total luas wilayah produktif sebesar 66%, wilayah industri sebesar 14,13%, wilayah banjir sebesar 22,76%, wilayah kekeringan sebesar 35,55% dan wilayah perkotaan yang masih sangat minim, hanya sebesar 10,23%.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Raja Ampat lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan yakni perikanan dan kelautan, pariwisata, perhubungan, dan pertambangan. Oleh karena itu, arah perencanaan program pembangunan Kabupaten Raja Ampat dapat difokuskan pada beberapa kegiatan antara lain bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, serta bidang sosial budaya. Dengan konsep integrasi pengembangan wilayah kelautan dan agropolitan pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Raja Ampat menempatkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan budidaya kelautan menjadi kegiatan budidaya utama. Berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, Kabupaten Raja Ampat sedikitnya memiliki 8 (delapan) pulau yang dapat dikembangkan sebagai kawasan andalan pengembangan. Mempertimbangkan bahwa pengembangan pulau-pulau tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, maka konsep pengembangan struktur ruangnya dikembangkan dalam bentuk kluster- kluster pengembangan wilayah.

Tabel 2.1. Potensi unggulan dan arah pengembangan kewilayahan menurut kluster di Kabupaten Raja Ampat

No	Kluster	Arahan Pengembangan
1	Pulau Waigeo dan sekitarnya	a) Pusat pemerintahan b) Agroindustri c) Wisata dan riset sumberdaya alam hayati d) Infrastruktur regional e) Pertambangan
2	Pulau Mansuar dan sekitarnya	a) Wisata bahari
3	Pulau Ayau dan sekitarnya	a) Kelautan b) Kawasan perbatasan
4	Pulau Misool dan sekitarnya	a) Agropolitan b) Budidaya kelautan c) Pertambangan
5	Pulau Kofiau, Boo dan sekitarnya	a) Pusat riset ekosistem perairan b) Budidaya pertanian dan perikanan c) Konservasi
6	Pulau Bantata, Salawati dan sekitarnya	a) Kawasan pertambangan b) Agroindustri c) Kehutanan
7	Pulau Gag dan sekitarnya	a) Budidaya kelautan b) Kehutanan
8	Pulau Wayag dan sekitarnya	a) Wisata dan riset kelautan

Sumber: RTRW Kabupaten Raja Ampat 2011-2030

Kluster-kluster tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang saling berinteraksi dan bersinergi membentuk pertumbuhan wilayah kabupaten secara berkelanjutan. Dalam pengembangan kluster minimal ada 2 hal yang harus diupayakan yaitu pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Kabupaten Raja Ampat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur wilayah menjadi komponen mutlak yang perlu untuk dijalankan dengan optimal. Kondisi tersebut dilatar belakangi dengan masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang selanjutnya memberikan dampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki nilai strategis dalam pembangunan di Kabupaten Raja Ampat, mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten konservasi yang dalam pengembangannya perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Kawasan Raja Ampat adalah kawasan yang memiliki fungsi dominan kawasan konservasi. Fungsi ini dituangkan salah satunya dalam RTRWN 2005-2025 melalui PP No 26 tahun 2007. Kabupaten Raja Ampat, selain sebagai kawasan andalan nasional bidang lingkungan hidup, juga merupakan salah satu kawasan konservasi dunia untuk keanekaragaman hayati dan kelautan.

Kawasan Laut Kepulauan Raja Ampat merupakan jantung dari keanekaragaman hayati laut, yang mengandung hampir 60% karang pembentuk terumbu di dunia dengan lebih dari 500 spesies telah diidentifikasi dan paling sedikit 1,074 jenis spesies ikan. Konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan ini merupakan prioritas utama dan kepentingan masyarakat dunia. Oleh karena itu pengembang wilayah Kabupaten Raja Ampat tidak dapat terlepas dari peran dan fungsinya secara nasional dan internasional tersebut.

Penggunaan lahan di Kabupaten Raja Ampat meliputi persawahan, pemukiman, tegalan/ladang, perkebunan rakyat serta untuk kegiatan lainnya. Penggunaan lahan di beberapa pulau sebagian besar masih berupa hutan alami yang belum terjamah. Beberapa pulau seperti Pulau Salawati, Pulau Saonek, Pulau Waigeo, Pulau Mansuar, dan Pulau Misool telah berdiri bangunan permanen dan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, balai desa, dan kantor kecamatan. Lahan yang telah digunakan untuk permukiman secara keseluruhan berada di dekat pantai. Berdasarkan RTRW Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, komposisi rencana

pemanfaatan ruang didominasi oleh budidaya non-kehutanan sebesar 41,11 persen, hutan suaka alam dan hutan wisata, serta cagar alam sebesar 38,70 persen, hutan lindung sebesar 20,16 persen, hutan produksi konversi sebesar 16,11 persen, dan hutan produksi sebesar 4,88 persen.

Tantangan dari aspek daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat antara lain:

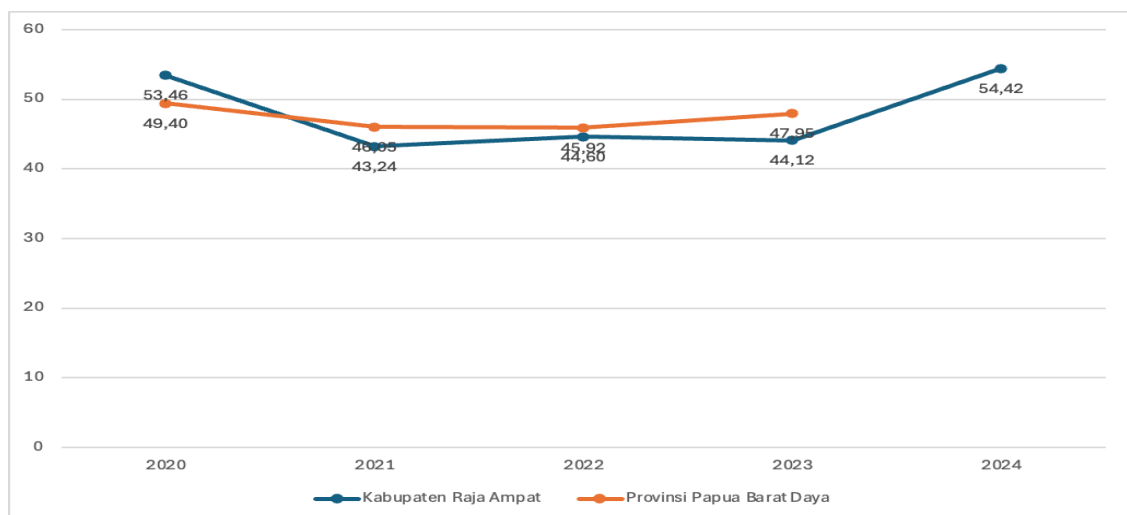
1. Status kurang lebih 50 persen wilayah hutan adalah hutan lindung atau cagar alam atau suaka alam;
2. Kondisi penduduk yang mendiami kampung dan distrik yang rawan bencana memiliki kerentanan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
3. Belum meratanya kemudahan akses terhadap pelayanan umum akan berpengaruh pada jaminan kehidupan yang sehat dan sejahtera, jaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, jaminan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang aman dan layak, dan jaminan akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua;
4. Belum kuatnya daya saing potensi unggulan pariwisata dan kelautan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak untuk semua, pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan pengembangan industri inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Pembangunan di Kabupaten Raja Ampat tidak dapat dilepaskan dari aspek ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Ketahanan energi di Kabupaten Raja Ampat dapat diukur dari konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah energi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam satu tahun. Data ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat elektrifikasi dan kemajuan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Raja Ampat belum dirilis, sehingga belum dapat diukur capaian ketahanan energi di kabupaten tersebut. Kabupaten Raja Ampat mendapatkan pasokan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLN memiliki peran dalam memasok listrik ke Kabupaten Raja Ampat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), salah satunya bantuan perahu listrik untuk nelayan.

Aspek ketahanan air dapat diukur dari akses rumah tangga terhadap air minum. Akses rumah tangga terhadap air minum di Kabupaten Raja Ampat masih menjadi tantangan karena kondisi geografis wilayah. Bupati Raja Ampat telah melakukan terobosan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Peraturan Bupati ini mengatur tentang RAD-AMPL sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian akses secara universal. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian akses secara universal.

Kemandirian pangan di Kabupaten Raja Ampat dapat diukur dari Indeks Ketahanan Pangan yang menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat diilustrasikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pangan Nasional (2024)

Gambar 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan angka

yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2021 hingga 2023 masih berada di bawah Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kurun waktu tersebut kerentanan area Provinsi Papua Barat Daya berada pada kelompok area rentan. Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Raja Ampat berada pada angka 54,42, sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya belum ada data yang dirilis, sehingga belum dapat dibandingkan capaian nilainya terhadap provinsi.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar yang cukup penting. Terlebih lagi, saat ini isu terkait lingkungan hidup juga menjadi isu di level nasional bahkan global. Lebih lanjut lagi, dalam setiap agenda pembangunan, aspek lingkungan hidup juga menjadi aspek yang selalu dipertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang seringkali digunakan untuk merepresentasikan pengelolaan lingkungan pada suatu daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan memperhatikan komponen kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berikut ini nilai IKLH dan komponen pembentuknya di Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, 2022

Indikator	Nilai
Indeks Kualitas Air	80,00
Indeks Kualitas Udara	74,31
Indeks Tutupan Lahan	86,30
IKLH	80,81

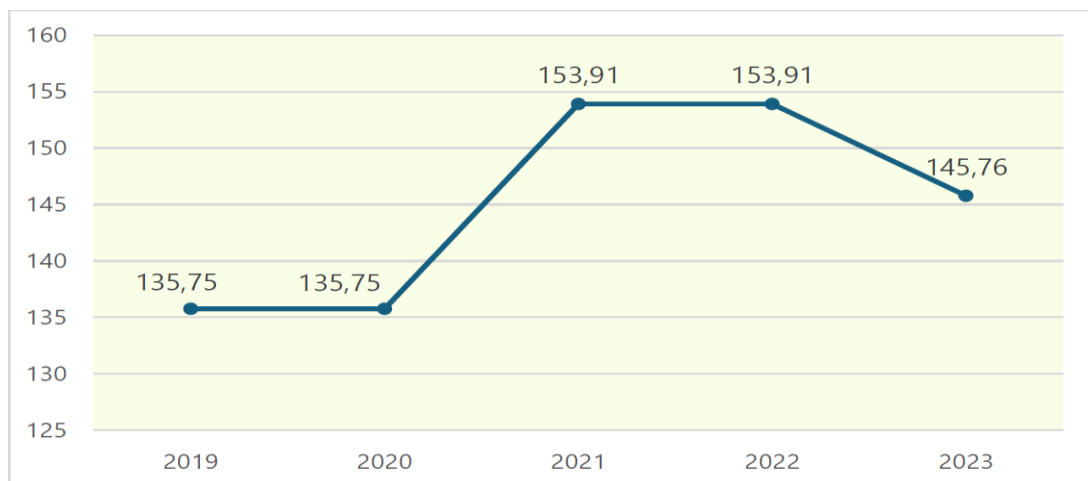
Sumber: Buku IKLH Provinsi Papua Barat, 2019

IKLH Kabupaten Raja Ampat tahun 2016 berada pada nilai 80,81 atau termasuk pada kategori baik. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Raja Ampat yang masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan pengembangan jaringan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa persoalan pengawasan lingkungan hidup juga masih terkendala ketersediaan alat dan teknologi pengukuran kualitas lingkungan.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh proses alam atau manusia yang menyebabkan kerugian korban jiwa, materil dan kerusakan lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagi empat istilah yang menggambarkan kondisi kebencanaan di Indonesia, yaitu risiko, bahaya, kerentanan, dan kerawanan. Kepulauan Raja Ampat terbentuk oleh pergerakan lempeng Pasifik dan pembentukan laut dalam sekitar 231-163 juta tahun lalu (Zaman Jura). Pada sekitar 125 juta tahun lalu (zaman kapur akhir), Benua Australia bergerak ke utara membentuk busur kepulauan (Supriatna, 1965). Gerakan lempeng Australia-India sekitar 8 cm/tahun ke utara – timur laut dan lempeng Pasifik sekitar 10 cm/tahun ke barat-barat laut membentuk Sesar Sorong yang membelah Pulau Batanta dan Salawati.

Posisi Raja Ampat di Sesar Sorong menjadikan Kabupaten Raja Ampat termasuk daerah rawan bencana. Kawasan tersebut dikelilingi oleh Laut Seram di bagian selatan, Laut Halmahera di bagian barat, dan Samudera Pasifik di bagian utara – timur, yang terdiri dari Pulau Waigeo, Batanta, Misool, Kofiau, Salawati, Sayang, Gag, Kawe, Gam, Manuran, Mansuar dan lainnya serta pulau-pulau kecil, juga beberapa selat yaitu Selat Dampier, Selat Sagawin, dan Selat Bougainville dan teluk-teluk antara lain Teluk Mayalibit, Kabui, Lilinta, Tomolol dan Nukari. Kondisi kebencanaan di Kabupaten Raja Ampat dapat dinilai melalui skor Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB yang disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Buku IRBI, 2023

Gambar 2.3. Grafik Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Raja Ampat

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2016 hingga 2023 mempunyai tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan hingga 18,16 poin, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai nilai 145,76. Nilai tersebut masih menempatkan Kabupaten Raja Ampat pada kelas risiko tinggi. Tahun 2016-2020 dan 2021-2022 nilai indeks risiko yang didapat tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan.

Tabel 2.3 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Raja Ampat, 2023

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	15,15	Tinggi
2	Gempabumi	26,21	Tinggi
3	Tsunami	12,68	Tinggi
4	Kebakaran hutan dan lahan	21,64	Tinggi
5	Tanah longsor	32,46	Tinggi
6	Gelombang ekstrim dan abrasi	32,46	Tinggi
7	Kekeringan	32,46	Tinggi
8	Cuaca ekstrim	4,66	Rendah

Sumber: Buku IRBI, 2023

Kabupaten Raja Ampat termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi. Jika dirinci menurut kelas bencana, kelas risiko bencana yang termasuk dalam kategori tinggi di Kabupaten Raja Ampat adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Kelas risiko bencana dengan kategori rendah di Kabupaten Raja Ampat adalah untuk bencana cuaca ekstrim. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dalam adaptasi dan mitigasi bencana, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat bencana dapat diminimalkan.

Risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 26,21. Pulau-pulau yang digolongkan ke dalam kategori daerah dengan nilai Intensitas Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) V antara lain Pulau Waigeo, Pulau Gag, Pulau Gam, Pulau Kawe dan sekitarnya, serta Pulau Misool dan sekitarnya, MMI VI-VII mencakup Pulau Batanta, Kofiau dan Sekitarnya. Kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang berbentuk kepulauan dan berada di mulut Samudera Pasifik dan dilempeng kontinental yang dinamik juga menyebabkan wilayah Kabupaten Raja Ampat masuk ke dalam kategori kawasan rentan bencana tsunami tinggi.

Zona-zona kerawanan longsor Kabupaten Raja Ampat sebagian besar berada

di wilayah Pulau Waigeo Barat, Waigeo Utara, dan sebagian Pulau Batanta dengan kategori ancaman yang tinggi. Kegiatan penambangan di Kabupaten Raja Ampat juga dapat menjadi bencana karena rawan terjadi bencana longsor seperti pada wilayah Pulau Salawati (batubara dan migas), Pulau Waigeo dan Gag (nikel) serta Pulau Batanta dan Misool (emas dan bahan baku semen). Menurut BNPB, risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 32,46.

Bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga merupakan ancaman di Kabupaten Raja Ampat dengan nilai 32,46. Bencana tersebut dapat terlihat di pulau-pulau kecil antara lain di sekitar Pulau Arborek dan Pulau Ayau yang terhantam gelombang terutama ketika musim angin dari arah barat dan selatan. Sementara itu, gelombang yang menghantam sekitar Kampung Waigama, Pulau Misool, searah arus laut dari timur menyusur ke barat telah mengurangi daratan. Erosi telah menggerus tanah di sekitar pantai oleh aliran permukaan, karena adanya penebangan pohon untuk pembukaan lahan pertanian dan permukiman. Sedimen di muara-muara sungai membentuk delta dan beting- beting pasir ke arah lautan. Hal ini dapat dilihat pada muara-muara sungai antara lain di Kampung Kalitoko, Warsamdin, Kabare di Pulau Waigeo, Sungai Wartandip Yensawai di Pulau Batanta, dan Sungai Kasim, Sungai Gamta dan Sungai Biga di Pulau Misool.

Bencana kebakaran di Kabupaten Raja Ampat sering terjadi pada hutan dataran rendah batu gamping dan karst saat musim kering seperti pada bagian utara Jurang Werabia. Kebakaran juga sering terjadi di ekosistem semak-semak pada ultra basik, seperti halnya yang terjadi di daerah karst. Bekas kebakaran banyak dijumpai di bagian perbukitan dekat Go di Teluk Mayalibit. Frekuensi kebakaran pada periode sekarang intensitasnya lebih tinggi sebagai akibat pembakaran perladangan berpindah dan usaha pembalakan hutan yang telah memacu kebakaran hutan. Menurut BNPB, risiko bencana kebakaran hutan di Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 21,64.

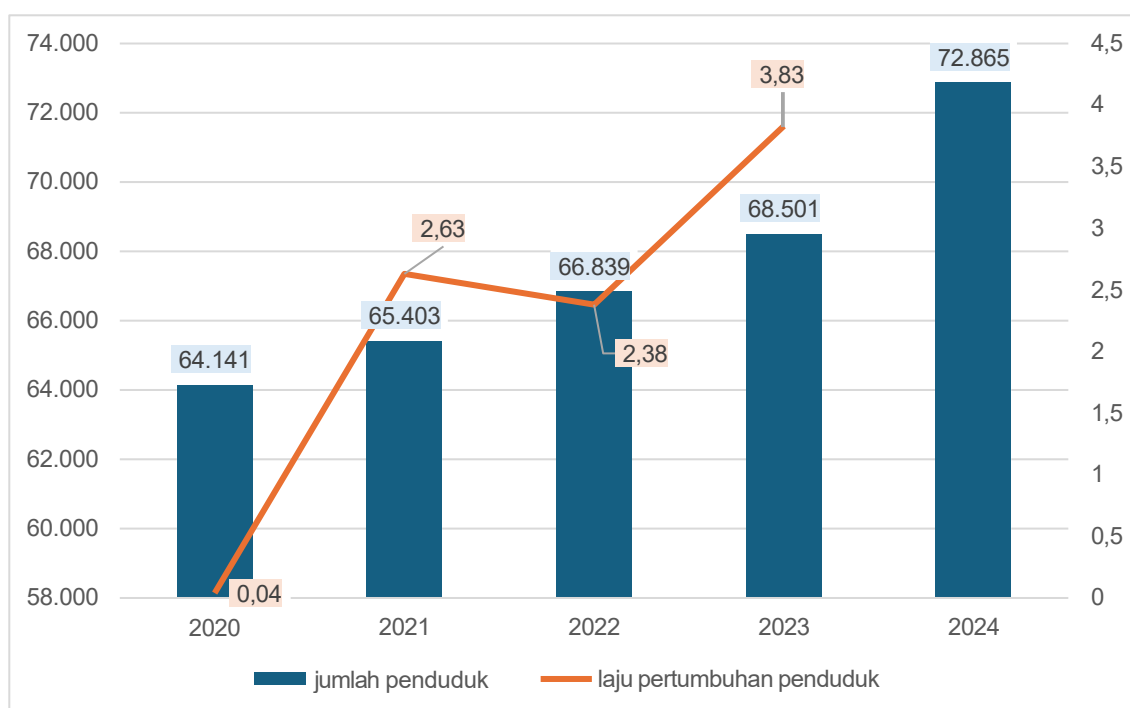
2.1.7 Demografi

Demografi di Kabupaten Raja Ampat bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk masuk maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Informasi demografi yang tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan proyeksi kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Raja Ampat.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Pusat Statistik dalam laporan tahunan Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2025 mencatat bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Raja Ampat sebanyak 72.865 jiwa pada tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.501 jiwa. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat dalam rentang tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2020-2025

Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 4.364 jiwa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan data yang dikeluarkan oleh BPS dan pada dokumen Kabupaten Raja Ampat dalam angka. Data penduduk yang dikeluarkan Kabupaten Raja Ampat dalam Angka tahun 2025 menggunakan angka terperinci dengan kelompok umur menghasilkan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 72.865 jiwa, sedangkan data yang dikeluarkan pada web BPS menghasilkan jumlah penduduk sebesar 70.061 jiwa. Namun, meskipun terdapat perbedaan detail jumlah penduduk pada tahun 2024, jumlah penduduk pada tahun tersebut masih menempati jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di distrik Waisai dimana pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 25.170 jiwa. Raja Ampat memiliki 24 distrik sehingga dapat dihitung bahwa rata-rata jumlah penduduk pada setiap kecamatan sebesar 2.073 jiwa. Distrik waisai memiliki menyumbang 31,70 persen terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Raja Ampat tahun 2020-2023 secara umum mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk menurun 0,25 poin. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,83.

2.1.7.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2024, berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, disajikan dalam gambar di bawah ini.

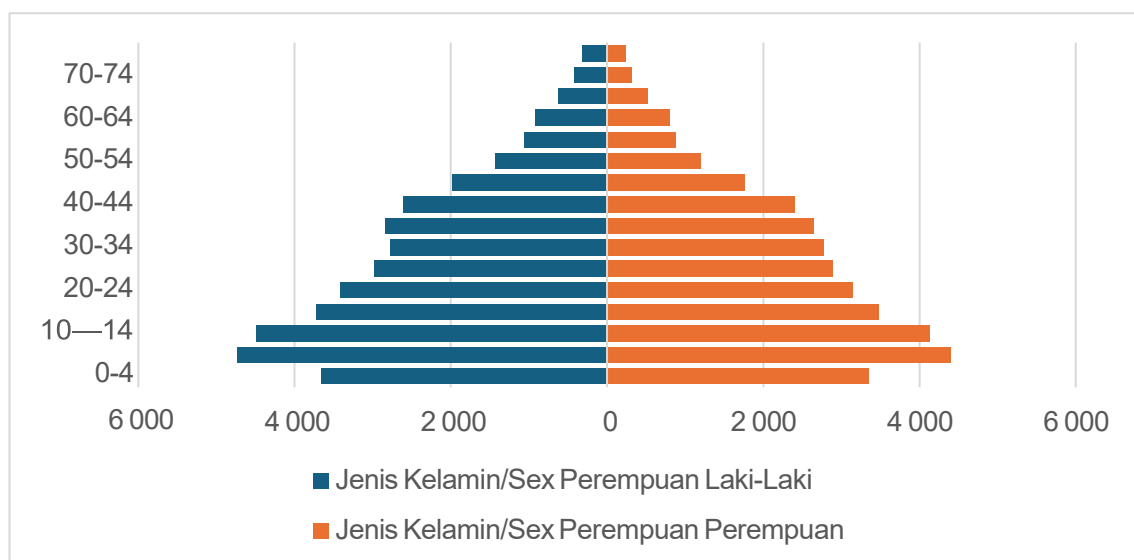
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	3.655	3.348	7.003
5 - 6	4.731	4.366	6.127

10 - 14	4.463	4.130	8.623
15 - 16	3.723	3.482	7.205
20 - 24	3.408	3.143	6.551
25 - 26	2.676	2.860	5.866
30 - 34	2.767	2.776	5.543
35 - 36	2.842	2.644	5.486
40 - 44	2.602	2.366	5.001
45 - 46	1.683	1.764	3.747
50 - 54	1.426	1.200	2.626
55 - 56	1.064	882	1.646
60 - 64	616	804	1.723
65 - 66	623	516	1.136
70 - 74	413	312	725
75+	317	237	554
Raja Ampat	37.942	34.923	72.865

Sumber : Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 37.642 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2024 sebesar 34.623 jiwa. Namun, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan masih dapat dikatakan seimbang. Lebih lanjut mengenai komposisi penduduk Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat melalui piramida penduduk sebagai berikut :



Sumber: BPS, Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2025

Gambar 2.5. Piramida Penduduk Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Struktur penduduk Kabupaten Raja Ampat berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 membentuk pola piramida penduduk muda atau ekspansif. Pola

piramida ekspansif umumnya terjadi pada negara atau daerah yang berkembang. Pola ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang jenis piramida penduduk yang menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan jumlah penduduk muda lebih besar dari penduduk usia tua. Mayoritas penduduk berada dalam usia produktif (5-40 tahun). Proporsi usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat sedang mengalami bonus demografi. Piramida ekspansif memiliki karakter jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan dengan angka kematian. Tingkat kematian, terutama kematian bayi, rendah. Kombinasi angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi Kabupaten Raja Ampat dalam pengembangan sumber daya manusia kedepannya.

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Raja Ampat dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data sex ratio yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai sex ratio penduduk Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan data awal tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	33.616	30.225	64,141	112,21
2021	34.575	30.828	65.403	112,15
2022	35.326	31.513	66.836	112,10
2023	36.000	32.501	68.501	110,77
2024	37.642	34.623	72.865	108,64

Sumber: BPS, Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2021-2025

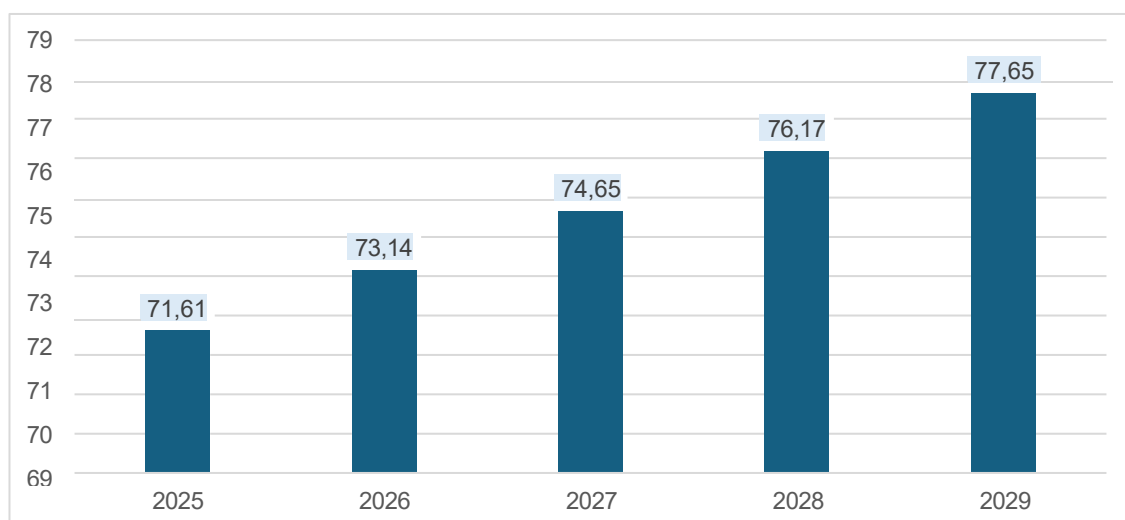
Sex ratio di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sex ratio di Kabupaten Raja Ampat tercatat sebesar 112,21 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 112 hingga 113 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Raja Ampat. Data yang dikeluarkan BPS pada Kabupaten Raja Ampat dalam Angka 2025 menunjukkan sex ratio penduduk sebesar 108,64 pada tahun 2024. Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat 108 hingga 106 laki-laki terhadap 100 perempuan.

Penurunan sex ratio yang semakin mendekati angka 100 mencerminkan keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penurunan yang cukup signifikan ini dapat disebabkan oleh tiga faktor utama: meningkatnya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan akibat migrasi masuk, serta berkurangnya jumlah laki-laki. Penurunan jumlah penduduk laki-laki sendiri bisa dipengaruhi oleh meningkatnya angka kematian atau meningkatnya migrasi keluar dari wilayah Kabupaten Raja Ampat.

2.1.7.4 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk berdasarkan berbagai kategori, seperti total populasi, tingkat kepadatan, serta distribusi penduduk menurut usia di Kabupaten Raja Ampat. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk memahami berbagai aspek kependudukan, termasuk kondisi lanjut usia, jumlah penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, serta potensi bonus demografi. Berikut ini merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2025 hingga 2026.

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Berikut hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2025 hingga 2026.



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020)

Gambar 2.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)

Secara umum, jumlah penduduk kabupaten Raja Ampat diproyeksi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam lima tahun kedepan, pada tahun 2026 diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat mencapai 77,65 ribu jiwa. Dimana pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 72,84 ribu jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk Raja Ampat mengalami peningkatan sebesar 4,81 ribu jiwa dalam lima tahun kedepan. Secara lebih rinci proyeksi penduduk Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)

Umur	Laki-Laki					Perempuan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,43	4,42	4,42	4,42	4,42
5-6	3,54	3,83	4,08	4,26	4,45	3,35	3,64	3,6	4,13	4,31
10-14	3,06	3,06	3,1	3,2	3,35	2,64	2,62	2,66	3,04	3,17
15-16	3,8	3,71	3,57	3,36	3,24	3,36	3,33	3,24	3,12	3,02
20-24	3,44	3,56	3,66	3,76	3,84	3,01	3,11	3,21	3,3	3,36
25-26	2,68	3,03	3,11	3,22	3,34	2,66	2,66	2,75	2,84	2,64
30-34	3	3,01	3,01	3	3	2,6	2,6	2,87	2,81	2,77
35-36	2,84	2,87	2,6	2,64	2,67	2,68	2,74	2,8	2,87	2,63
40-44	2,63	2,67	2,7	2,72	2,74	2,37	2,45	2,51	2,57	2,62
45-46	2,18	2,26	2,35	2,42	2,5	1,65	2,02	2,1	2,17	2,24
50-54	1,76	1,84	1,6	1,66	2,02	1,46	1,58	1,67	1,75	1,82
55-56	1,22	1,28	1,37	1,46	1,56	0,68	1,04	1,11	1,2	1,26
60-64	0,66	0,66	1	1,01	1,04	0,82	0,83	0,83	0,83	0,85
65-66	0,76	0,81	0,83	0,84	0,84	0,58	0,62	0,66	0,66	0,71
70-74	0,4	0,45	0,46	0,54	0,58	0,35	0,38	0,4	0,43	0,45
75+	0,25	0,27	0,26	0,32	0,35	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34
Raja Ampat	37,5	38,23	38,66	39,66	40,4	34,11	34,61	35,7	36,48	37,25

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020)

Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dalam ribuan jiwa dari tahun 2025 hingga 2026. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk baik jumlah penduduk laki-laki ataupun Perempuan. Dalam lima tahun kedepan diproyeksikan piramida penduduk Kabupaten Raja Ampat masih memiliki bentuk yang sama, Dimana jumlah penduduk usia muda mendominasi komposisi penduduk Raja Ampat.

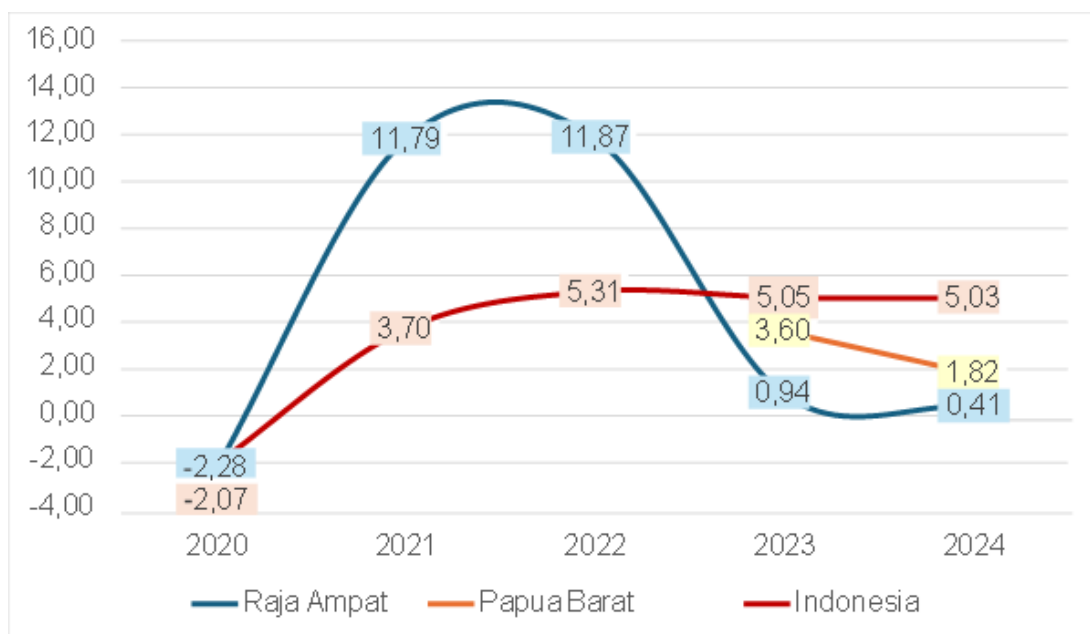
2.2. Aspek kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan di suatu wilayah dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai taraf hidup masyarakat. Gambaran mengenai kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat melalui sejumlah indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, Indeks Gini, serta tingkat inflasi. Uraian berikut menyajikan data-data tersebut sebagai dasar untuk memahami situasi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan produksi. Berikut disajikan perkembangan LPE Kabupaten Raja Ampat selama periode tahun 2020–2024.



Sumber: BPS Raja Ampat, 2025; BPS Papua Barat, 2025; BPS Indonesia, 2025

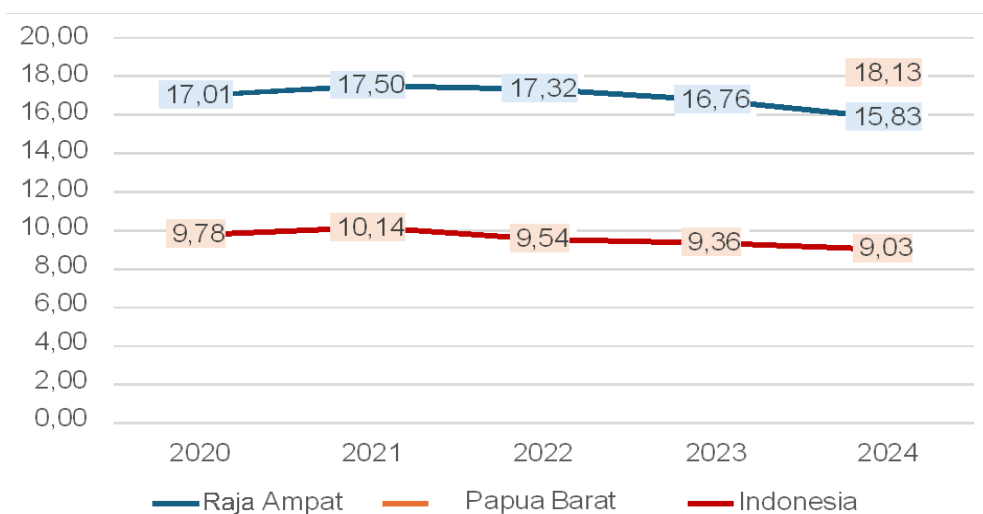
Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Membandingkan antara titik akhir data dengan titik awal, pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren yang meningkat, meskipun cukup fluktuatif dalam perjalanannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebesar 4,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 2,71 persen dan nasional sebesar 3,40 persen. Cukup pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah ini secara umum didorong oleh pertumbuhan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, yang didorong oleh pembukaan aktivitas ekonomi kembali pasca Covid-19. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Raja Ampat masih cukup fluktuatif dalam perjalanannya. Hal ini mengindikasikan produktivitas perekonomian daerah yang masih fluktuatif, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya belum konsistennya produktivitas sektor unggulan daerah dalam menghasilkan nilai tambah, fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, dan terbatasnya pasar bagi hasil ekonomi daerah.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, yang dinilai berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dan Indonesia selama periode 2020–2024 dapat dilihat melalui data yang ditampilkan pada gambar berikut.



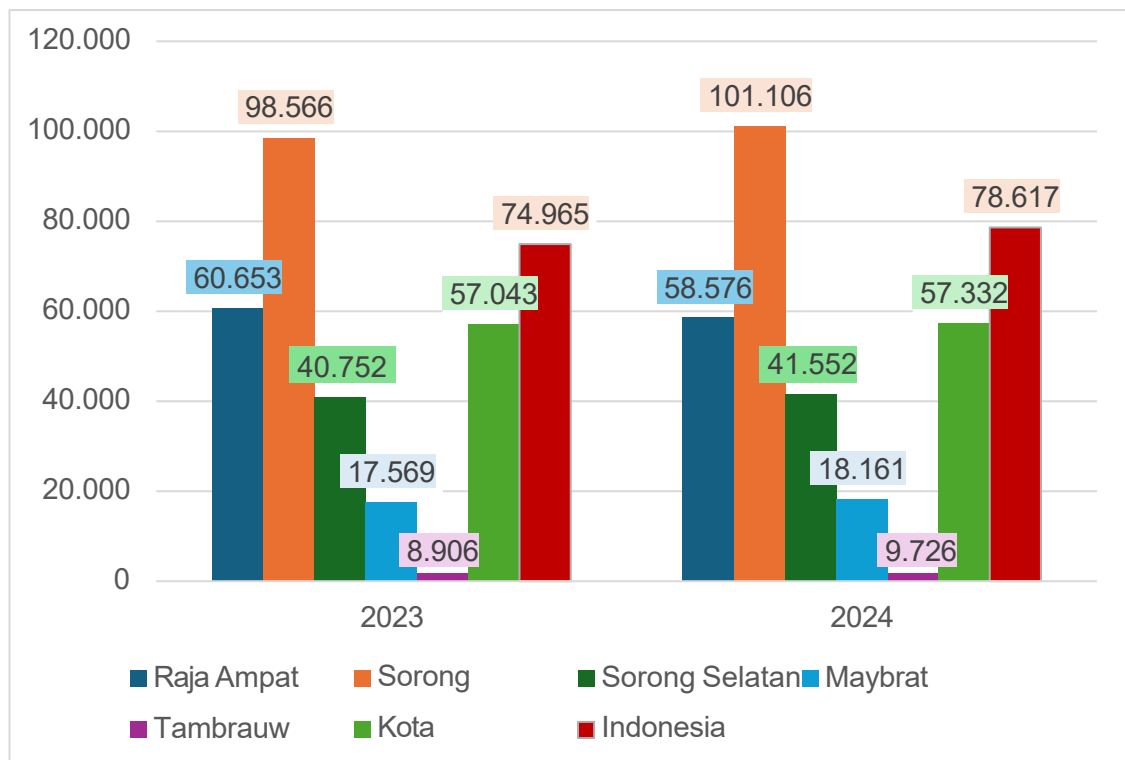
Sumber: BPS Raja Ampat, 2025; BPS Papua Barat, 2025; BPS Indonesia, 2025

Gambar 2.8 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren yang menurun, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2021. Penurunan kemiskinan Kabupaten Raja Ampat tercatat sebesar 1,18 poin dibandingkan dengan kondisi awal, dengan persentase penurunan sebesar 6,64 persen. Penurunan secara proporsi ini lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata di level nasional dengan penurunan proporsi sebesar 0,75 poin dari kondisi awal, meskipun secara persentase nasional memiliki capaian yang lebih baik dengan persentase penurunan sebesar 7,66 persen yang disebabkan oleh lebih rendahnya kondisi awal di level nasional. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Raja Ampat berada lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Papua Barat Daya, dengan selisih sebesar 2,30 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja penurunan kemiskinan daerah yang sudah cukup baik, meskipun kondisi saat ini masih jauh dari ideal dikarenakan masih jauhnya capaian kinerja pengentasan kemiskinan dengan angka rata-rata nasional dengan gap sebesar 6,80 poin. Pemerintah perlu merumuskan strategi lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan daerah, mulai dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, perlindungan sosial yang adaptif, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang layak.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan masyarakat suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini diperoleh dengan membagi total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun yang bersangkutan. Ditingkat daerah di Indonesia, PDRB per kapita sering dijadikan sebagai proksi kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk. Dalam konteks Kabupaten Raja Ampat, PDRB per kapita memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi perekonomian daerah terhadap pendapatan rata-rata per orang. Berikut data mengenai PDRB per kapita Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2020–2024.



Sumber: BPS Papua Barat, 2025; BPS Indonesia, 2025

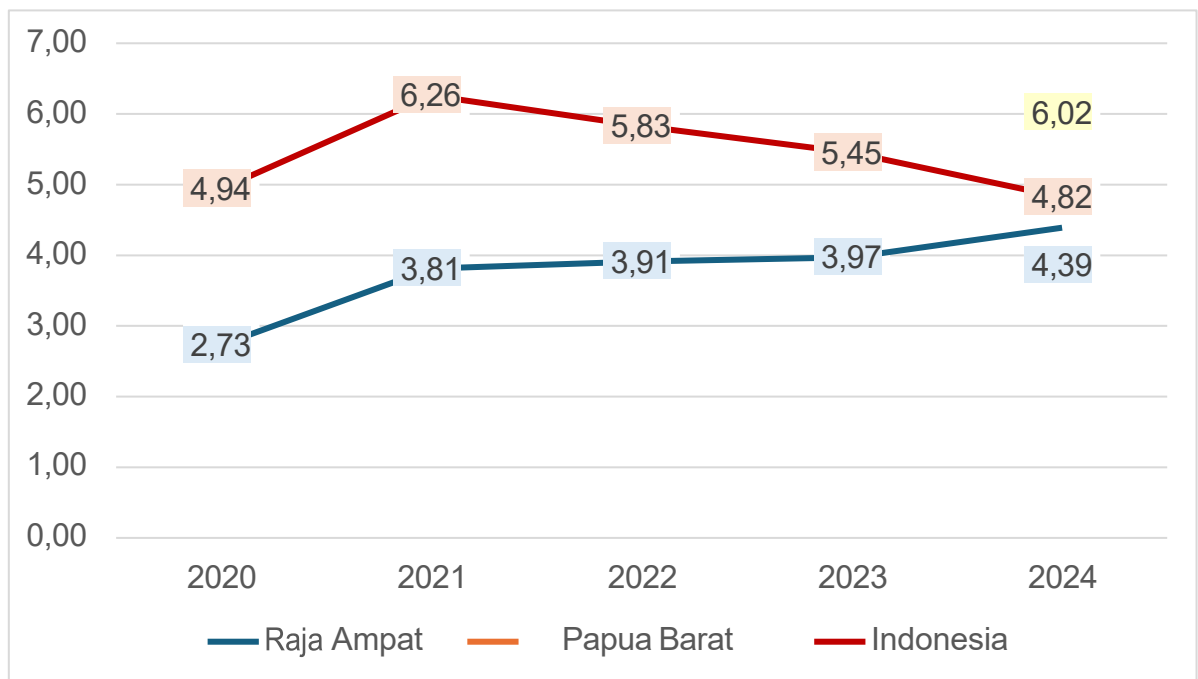
Gambar 2.9. Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023-2024

PDRB per kapita Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini tercatat sebesar 2.077 juta rupiah atau dengan persentase penurunan sebesar 3,42 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, PDRB per kapita Kabupaten Raja Ampat merupakan yang tertinggi kedua, hanya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas perekonomian daerah yang menghasilkan nilai tambah lebih dengan kondisi penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah padat penduduk. Meskipun tingginya PDRB per kapita mengindikasikan produktivitas masyarakat yang tinggi, namun hal ini juga perlu dilihat dengan indikator lain seperti indeks gini untuk melihat distribusi dari hasil ekonomi yang dilakukan.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu aspek krusial dalam pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM memiliki kaitan yang erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi berbagai peluang kerja di wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meskipun secara definisi TPT

mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan, indikator ini memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi pengangguran, karena tidak mencakup mereka yang tidak aktif mencari kerja atau bekerja di bawah standar yang layak. Berikut merupakan kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.



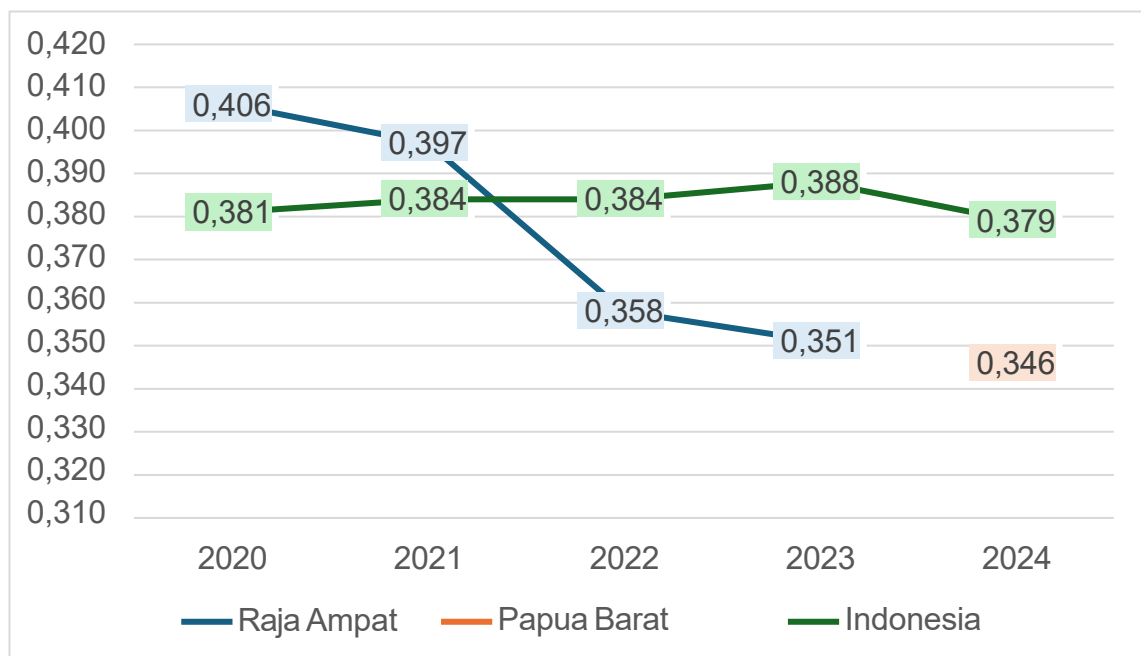
Sumber: BPS Raja Ampat, 2025; BPS Papua Barat, 2025; BPS Indonesia, 2025

Gambar 2. 10 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. Peningkatan ini terjadi sebesar 1,66 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 60,81 persen. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi dan nasional dengan masing-masing capaian sebesar 6,02 dan 4,82. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan menurunnya akses masyarakat terhadap kesempatan kerja yang berada di daerah, yang menyebabkan serapan tenaga kerja daerah menjadi menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh kompetensi tenaga kerja yang belum memadai, tidak sesuainya kompetensi dengan permintaan pasar, dan belum memadainya sektor-sektor ekonomi penghasil lapangan kerja daerah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menandakan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana seluruh individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem, di mana seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus menjaga nilai indeks ini mendekati 0, sebagai cerminan dari peningkatan pemerataan ekonomi. Perbandingan nilai Indeks Gini antara Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dan Indonesia selama periode 2020–2024 dapat diamati melalui grafik berikut.



Sumber: BPS Raja Ampat, 2025; BPS Papua Barat, 2025; BPS Indonesia, 2025

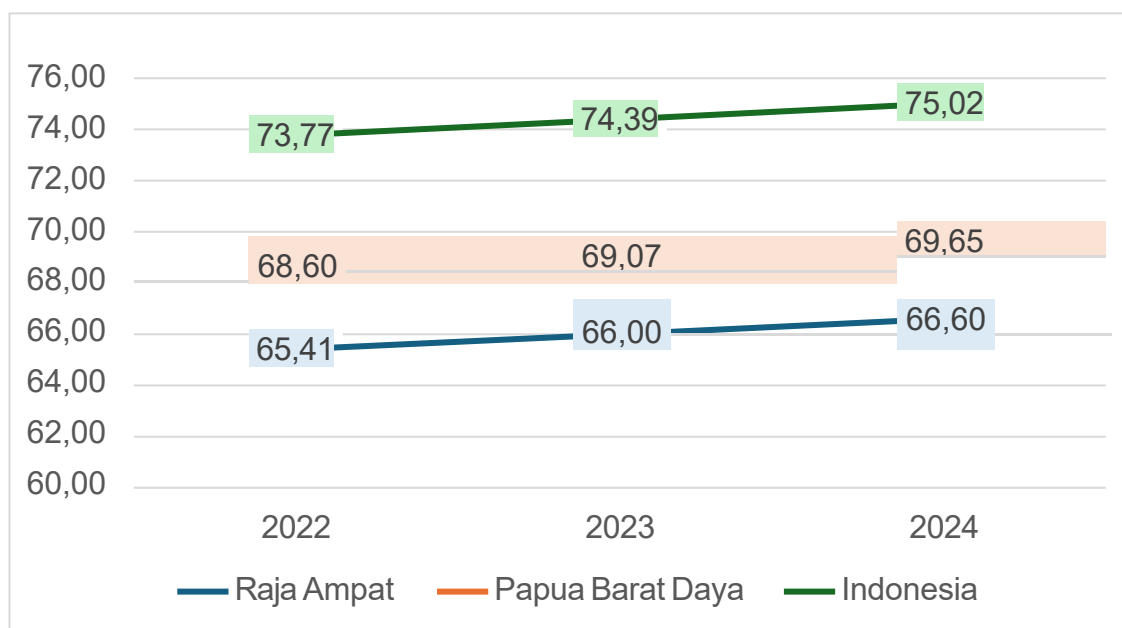
Gambar 2.11. Grafik Indeks Gini Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Indeks Gini Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami tren penurunan. Penurunan ini tercatat sebesar 0,055 poin atau dengan persentase penurunan sebesar 13,55 persen. Dalam kurun waktu yang sama, kondisi ketimpangan di level nasional mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2024 kondisi ini membaik. Pada tahun 2024, data ketimpangan bagi daerah Kabupaten Raja Ampat belum tersedia, sedangkan data bagi provinsi tercatat sebesar 0,346 dan nasional sebesar 0,376. Jika merujuk pada data tahun 2024, ketimpangan Kabupaten

Raja Ampat pada tahun 2023 sudah lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan nasional, meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi. Hal ini mengindikasikan ketimpangan yang sudah lebih baik meskipun perlu peningkatan lebih lanjut melalui peningkatan akses sumber penghidupan yang layak.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator makro yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi ini diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. UHH mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi masyarakat, RLS dan HLS menggambarkan akses terhadap pendidikan formal, sementara pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan data capaian IPM Kabupaten Raja Ampat untuk periode tahun 2022–2024.



Sumber: BPS Papua Barat, 2025

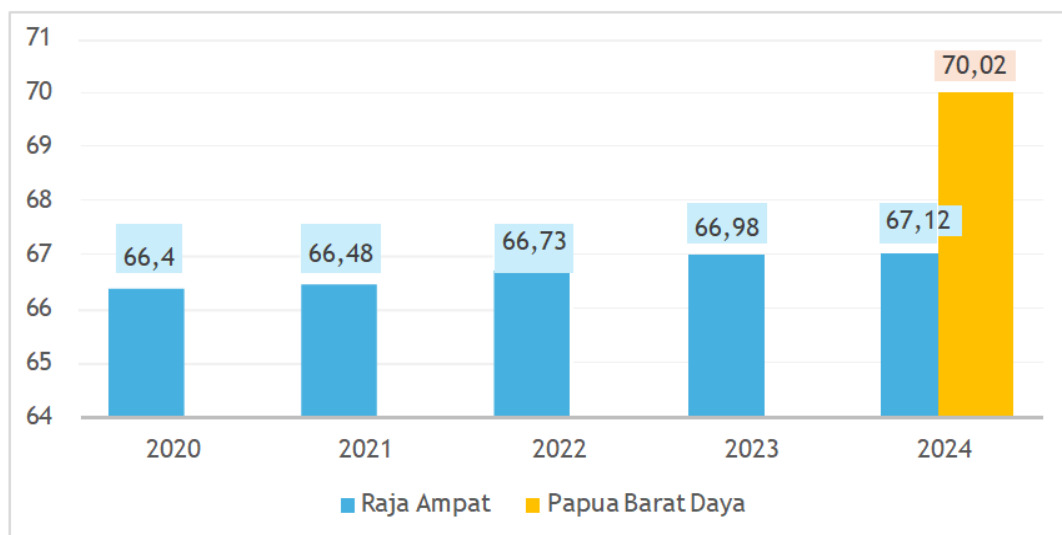
Gambar 2.12. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022-2024
(UHH 2020)

Secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Raja Ampat tahun 2022-2024 memiliki tren yang meningkat. Peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Raja Ampat tercatat sebesar 1,16 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 1,82 persen. Persentase peningkatan ini merupakan yang

tertinggi diantara persentase peningkatan rata-rata provinsi dan nasional masing-masing dengan persentase peningkatan sebesar 1,53 persen dan 1,66 persen. Meskipun demikian, tingkat pembangunan manusia Kabupaten Raja Ampat masih berada di bawah kondisi rata-rata provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan berbagai persoalan masih meliputi pembangunan manusia masyarakat Kabupaten Raja Ampat secara umum, mulai dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat secara umum.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Raja Ampat.



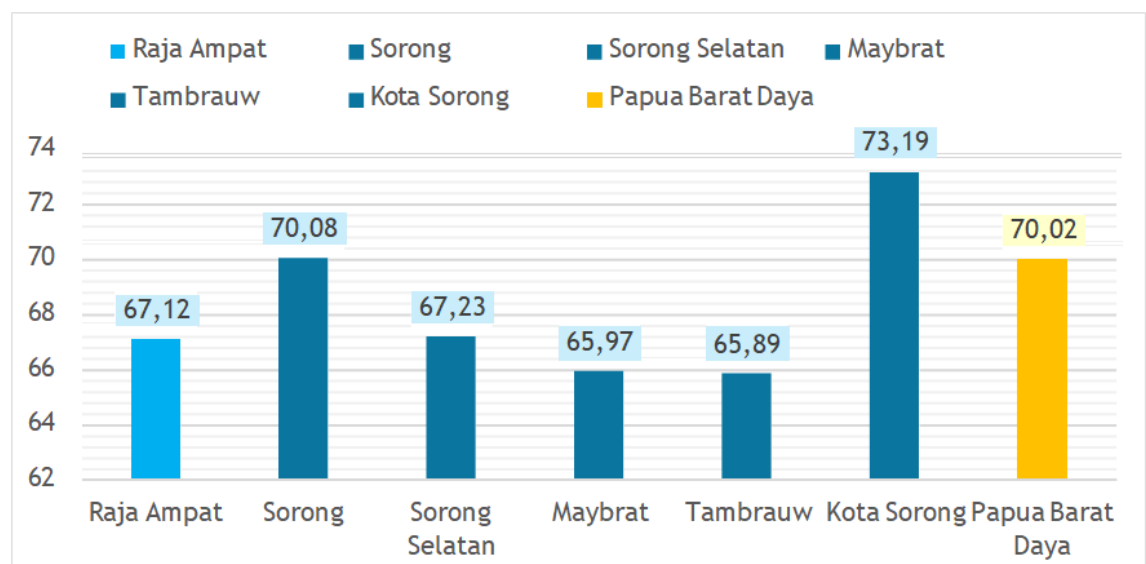
Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2.13. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024. Hasil Long Form SP2020

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Raja Ampat menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Kabupaten Raja Ampat naik 0,72 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa

pembangunan kesehatan di Kabupaten Raja Ampat berjalan cukup baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yakni pemenuhan jaminan kesehatan. Pada tahun 2024, Raja Ampat mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) non cut off atas upaya memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapat pelayanan BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu masa aktif. Adapun tingkat keaktifan peserta diatas 66 persen.

Meskipun mengalami kenaikan, capaian UHH Kabupaten Raja Ampat masih dibawah Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, UHH Raja Ampat lebih rendah 2,6 poin dibanding Papua Barat Daya dengan nilai masing-masing 67,12 dan 70,02. Artinya, bayi yang baru lahir di Raja Ampat pada tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 67,12 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya 70,02 tahun. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih perlu dioptimalkan.



Sumber: BPS Papua Barat, 2025

Gambar 2.14. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024

Dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, terdapat empat kabupaten yang memiliki capain UHH dibawah Provinsi Papua Barat Daya yakni Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrau. Sedangkan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong memiliki capaian UHH diatas provinsi. Meskipun dibawah provinsi, UHH Kabupaten Raja Ampat masuk dalam tiga besar tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Secara umum, Usia Harapan Hidup (UHH) dipengaruhi oleh banyak faktor

diantaranya akses dan kualitas layanan kesehatan, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai.

Tabel 2.7. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023-2024

No	Distrik	Rumah Sakit Umum		Puskesmas	
		2023	2024	2023	2024
1	Misool Selatan	-	-	1	1
2	Misool Barat	-	-	1	1
3	Misool	-	-	-	-
4	Kofiau	-	-	-	-
5	Misool Timur	-	-	1	1
6	Kep. Sembilan	-	-	1	1
7	Salawati Utara	-	-	1	1
8	Salawati Tengah	-	-	-	1
6	Salawati Barat	-	-	-	1
10	Batanta Selatan	-	-	1	1
11	Batanta Utara	-	-	-	1
12	Waigeo Selatan	-	-	1	1
13	Teluk Mayalibit	-	-	1	1
14	Meos Mansar	-	-	1	1
15	Kota Waisai	1	1	1	1
16	Tiplol Mayalibit	-	-	1	1
17	Waigeo Barat	-	-	1	1
18	Waigeo Barat Kep.	-	-	1	1
16	Waigeo Utara	-	-	-	-
20	Warwabomi	-	-	1	1
21	Supnin	-	-	-	1
22	Kepulauan Ayau	-	-	-	-
23	Ayau	-	-	1	1
24	Waigeo Timur	-	-	1	1
	Kabupaten Raja Ampat	1	1	16	20

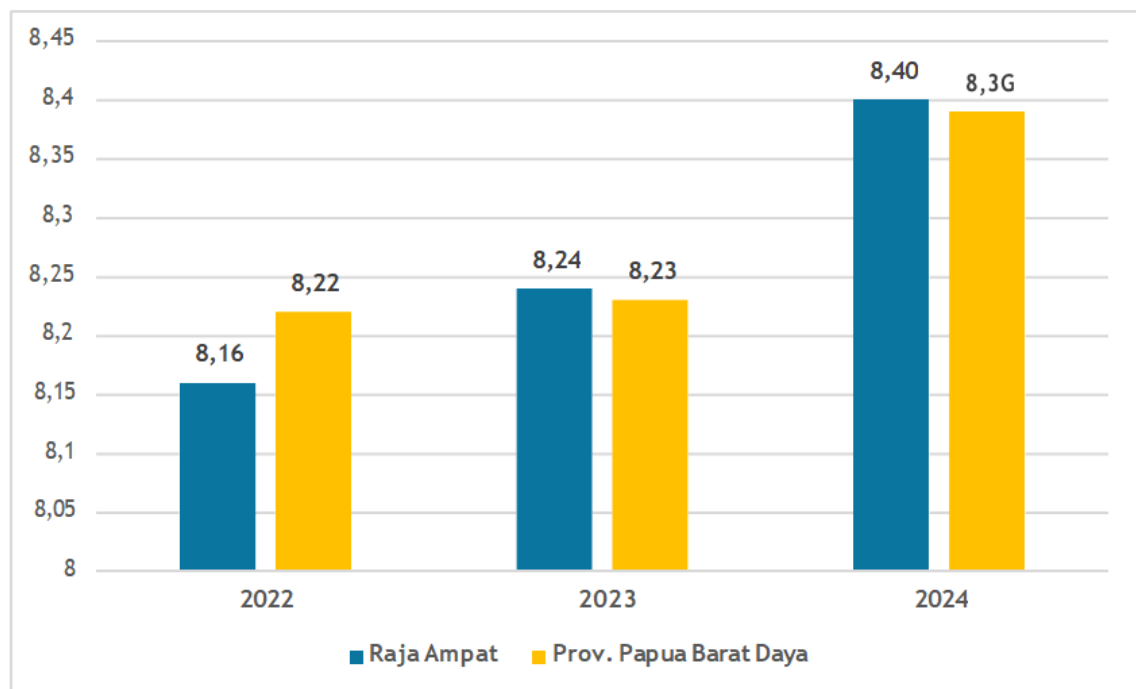
Sumber: BPS Raja Ampat, 2025

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Raja Ampat masih perlu ditingkatkan. Adapun rumah sakit umum baru ada satu dan terdapat di ibukota Kabupaten, Waisai. Sedangkan, puskesmas berjumlah 20 buah. Masih ada distrik yang belum memiliki puskesmas diantaranya Distrik Misool, Kofiau, Waigeo Utara, dan Kepulauan Ayau. Untuk itu, pemenuhan fasilitas kesehatan yang merata pada semua wilayah masih perlu ditingkatkan.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Tingkat kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat diukur melalui beberapa

indikator makro di bidang pendidikan, seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator ini mencerminkan aspek pengetahuan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sementara itu, HLS menggambarkan estimasi lamanya waktu yang kemungkinan akan ditempuh oleh anak berusia 7 tahun dalam menempuh pendidikan di masa depan. RLS dan HLS berfungsi untuk menilai akses pelayanan serta kondisi sistem pendidikan di suatu daerah. Berikut ini merupakan capaian RLS dan HLS di Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya selama periode 2022-2024.



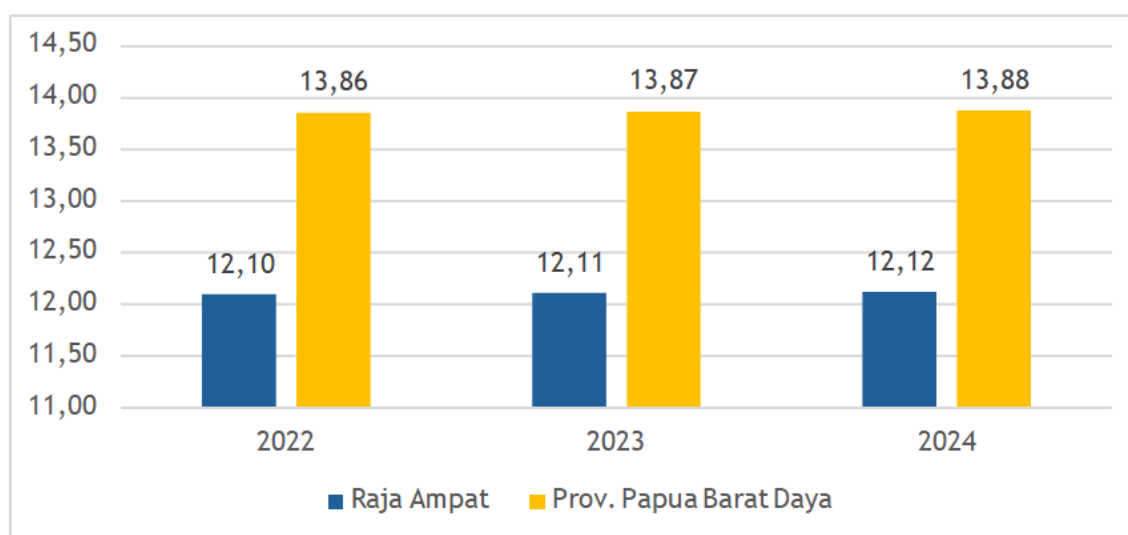
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Gambar 2. 15 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022-2024

Selama periode 2022-2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Raja Ampat mengalami tren yang meningkat. RLS Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin selama tiga tahun terakhir. Capaian tersebut sudah berada di atas rata-rata provinsi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Raja Ampat berada pada angka 8,40 atau selisih 0,01 poin lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Papua Barat Daya yang berada pada angka 8,36. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Raja Ampat yang berusia 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga 8,40 tahun atau setara kelas 2 SMP, sedangkan rata-rata Provinsi Papua Barat Daya hingga 8,36 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Walaupun demikian, capaian RLS Kabupaten

Raja Ampat masih perlu ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah yang meningkat akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan secara lebih luas. Selain itu, peningkatan lama sekolah juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang mencanangkan program wajib belajar 13 tahun.

Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan merupakan faktor penting dalam upaya menaikkan rata-rata lama sekolah serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Akses pendidikan dapat ditingkatkan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, melengkapi fasilitas pembelajaran, menambah jumlah serta meratakan sebaran guru dan tenaga pendidik, serta menggalakkan promosi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik, penguatan kemampuan literasi, serta kerja sama antar lembaga pendidikan.



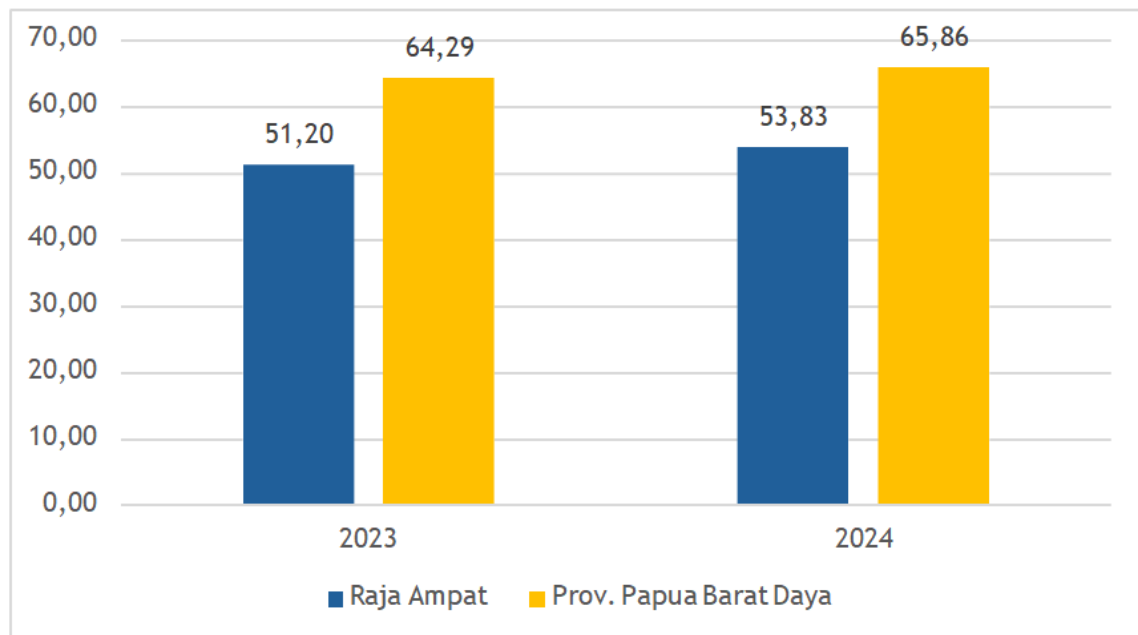
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Gambar 2. 16 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022-2024

Selama periode 2022-2024, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Raja Ampat mengalami tren yang meningkat. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Papua Barat Daya. HLS Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Raja Ampat berada pada angka 12,12. Capaian tersebut selisih 1,17 poin lebih rendah dibanding Provinsi Papua Barat Daya yang sudah berada pada angka 13,88. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga 12,12 tahun atau setara tingkat SMA kelas 3, sedangkan rata-rata Provinsi Papua Barat Daya hingga 13,88 tahun atau setara dengan D1. Namun demikian, capaian harapan lama sekolah (HLS) perlu untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara lebih luas, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045.

Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM diukur dari 7 unsur dan 16 indikator. Ketujuh unsur tersebut yakni pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Nilai IPLM dalam skala 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPLM, maka semakin baik tingkat literasi masyarakat. Ada lima tingkatan dalam nilai IPLM yaitu 0-30 sangat rendah, 30-50 rendah, 50-80 sedang, 80-100 tinggi, dan 60-100 sangat tinggi. Capaian sangat rendah dan rendah mengindikasikan perlunya upaya pembinaan dari pemerintah pusat/provinsi, capaian sedang mengindikasikan tingkat literasi memenuhi standar, capaian tinggi mengindikasikan tingkat literasi cukup baik, dan capaian sangat tinggi mengindikasikan budaya literasi yang baik dan bisa menjadi perpustakaan percontohan. Capaian IPLM diukur oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Berikut capaian IPLM menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Gambar 2.17. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, capaian indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Raja Ampat sebesar 53,83 atau berstatus sedang. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,63 poin dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 51,20. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator dalam masing-masing unsur sudah mengalami perbaikan, walaupun masih perlu untuk terus ditingkatkan. Indikator tersebut diantaranya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, kekurangan koleksi perpustakaan yang memenuhi standar, kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemanfaatan perpustakaan Hal ini perlu dilakukan, mengingat capaian IPLM Kabupaten Raja Ampat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat Daya.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Kondisi perlindungan sosial yang optimal dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat dijamin kehidupannya agar dapat sesuai dengan standar hidup layak. Perlindungan sosial yang adaptif dengan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan menjadi aspek krusial bagi pembangunan daerah secara umum, mengingat dalam masa-masa krisis masyarakat rentan cenderung masuk ke dalam kondisi kemiskinan. Dengan adanya perlindungan sosial yang adaptif terhadap

kondisi sosial ekonomi suatu wilayah, masyarakat daerah tersebut tetap dapat hidup secara layak meskipun secara riil mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini dapat digambarkan melalui cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan daerah, dimana indikator ini menghitung proporsi peserta jaminan ketenagakerjaan dengan jumlah total tenaga kerja secara umum.

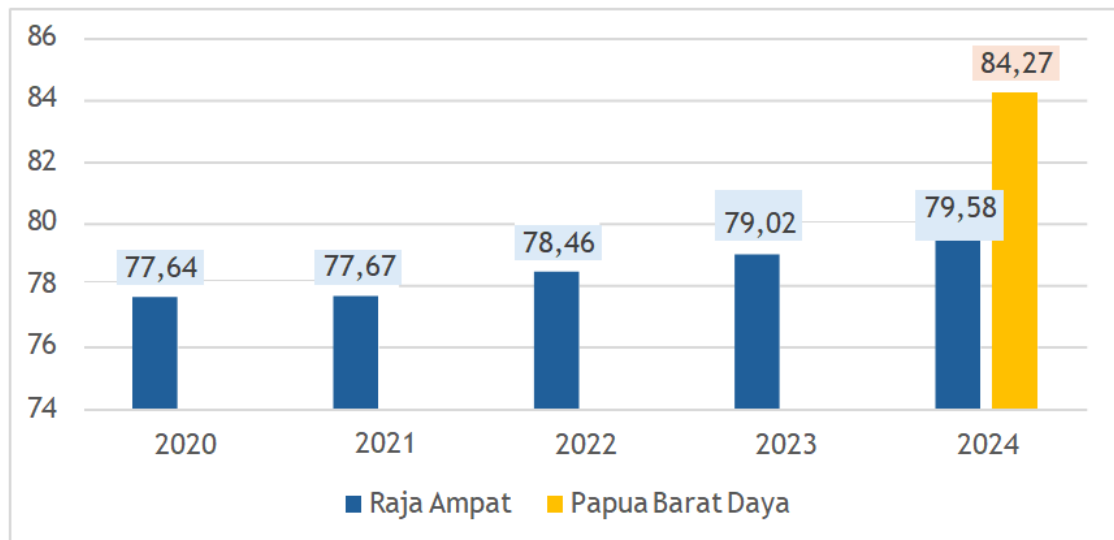
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara praktik kehidupan beragama yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan perkembangan budaya yang terus berkembang tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Beragama maslahat berarti bahwa praktik keagamaan tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga berdampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan beragama yang seperti ini mampu membangun sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antar individu maupun kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mendorong terjadinya kerukunan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki kualitas hidup bersama.

Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan dinamika budaya yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, tanpa kehilangan akar tradisi dan identitas budaya yang ada. Kemajuan dalam bidang budaya mencakup inovasi di berbagai sektor seperti seni, pendidikan, teknologi, dan sistem sosial, yang tetap menghargai warisan leluhur namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan global. Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan perkembangan budaya yang inovatif menghasilkan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Pencapaian Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju di suatu wilayah dapat diukur melalui indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

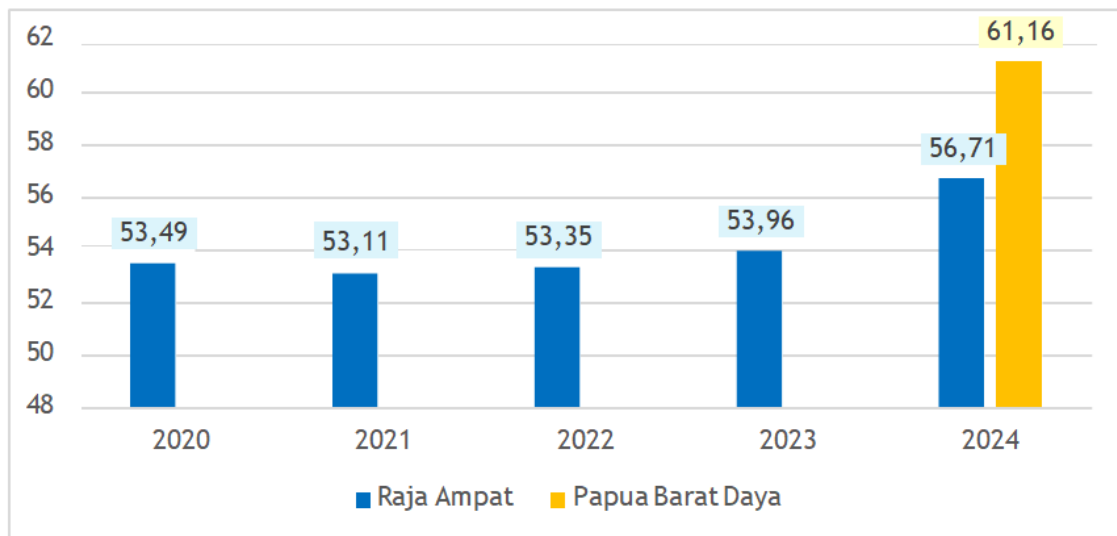
Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut diantaranya indeks pembangunan gender (IPG), indeks pemberdayaan gender (IDG), indeks kualitas keluarga, dan sebagainya.



Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2.18. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024

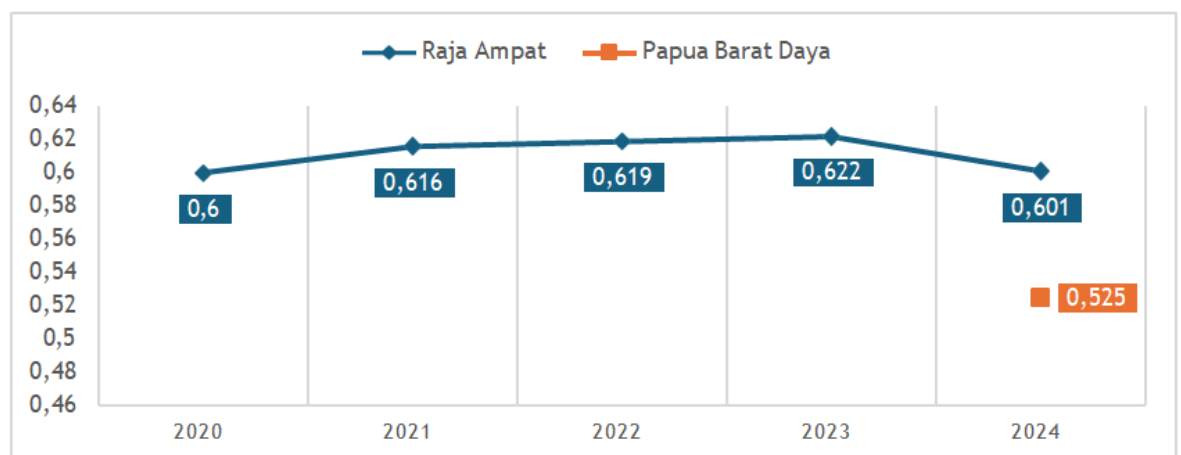
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2020-2024, capaian IPG Kabupaten Raja Ampat menunjukkan trend meningkat yakni dari 77,64 menjadi 79,58. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin membaiknya perwujudan kesetaraan gender di Kabupaten Raja Ampat. Namun, capaian tersebut masih dibawah Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, IPG Raja Ampat lebih rendah 4,69 poin dibanding Papua Barat Daya dengan nilai masing-masing 79,58 dan 84,27. Dengan demikian, upaya kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan diantaranya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak baik laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2.19. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran IDG skala dari 0 hingga 100. Semakin tinggi IDG menunjukkan semakin setara antara laki-laki dan perempuan. Selama periode 2020-2024, capaian IDG Kabupaten Raja Ampat mengalami trend yang fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 53,35 dan tertinggi tahun 2024 sebesar 56,71. Capaian tersebut masuk dalam kategori sedang (50-60). Dengan demikian, upaya pemberdayaan gender masih perlu ditingkatkan. Adapun upaya yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan partisipasi perempuan pada parlemen, peningkatan partisipasi perempuan pada tenaga profesional dan peningkatan pendapatan perempuan.



Sumber: BPS Nasional,, 2025

Gambar 2.20. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Raja Ampat dan

Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi IKG maka semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya. Selama periode 2020-2023, capaian IKG Kabupaten Raja Ampat menunjukkan trend yang meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut perlu mendapat perhatian pada pembangunan berikutnya agar seluruh proses pembangunan lebih setara gender.

Tabel 2.8. Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024

No	Komponen IKG	2022	2023	2024
1	Proporsi perempuan usia 15–46 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan	0,74	0,76	0,71
2	Proporsi perempuan usia 15–46 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun	0,3	0,34	0,3
3	Keterwakilan di Legislatif (Laki-laki) (%)	60	10	85
4	Keterwakilan di Legislatif (Perempuan) (%)	10	10	15
5	Pendidikan Minimal SMA (Laki-laki) (%)	36,25	34,06	36
6	Pendidikan Minimal SMA (Perempuan) (%)	33,82	30,66	32,66
7	TPAK (Laki-laki) (%)	78,77	72,41	80,42
8	TPAK (Perempuan) (%)	42,46	43,34	45,15

Sumber: BPS Raja Ampat, 2025

Berdasarkan komponen pembentuk IKG Kabupaten Raja Ampat tahun 2022-2024, capaian pada aspek politik, pendidikan dan tenaga kerja mengalami peningkatan, sedangkan pada aspek kesehatan menunjukkan capaian yang stagnan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan pada parlemen, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan kerja menunjukkan sebuah peningkatan. Namun, terkait aspek kesehatan yang direpresentasikan dari Proporsi perempuan usia 15–46 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan dan Proporsi perempuan usia 15–46 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas kesehatan pada perempuan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen krusial dalam menentukan tingkat kemajuan suatu wilayah. SDM yang berkualitas dan kompeten tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penguasaan keterampilan, pendidikan yang memadai, dan kemampuan berinovasi menjadi penentu utama sejauh mana individu mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan nilai ekonomi di lingkungannya.

Produktivitas suatu daerah sangat bergantung pada mutu SDM yang dimilikinya. Tenaga kerja yang unggul lebih cakap dalam mengelola sumber daya, menghasilkan output yang tinggi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. Peningkatan produktivitas ini secara langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, daya saing SDM juga memiliki kaitan erat dengan angka ketergantungan, yakni perbandingan antara jumlah penduduk yang belum atau tidak lagi berada dalam usia produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia kerja. Daerah yang memiliki angka ketergantungan tinggi umumnya menghadapi tekanan ekonomi lebih besar karena kelompok produktif menanggung beban sosial dan finansial yang lebih besar. Sebaliknya, penurunan angka ketergantungan yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dapat memberikan peluang terjadinya bonus demografi dimana mayoritas penduduk berada dalam usia produktif dan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

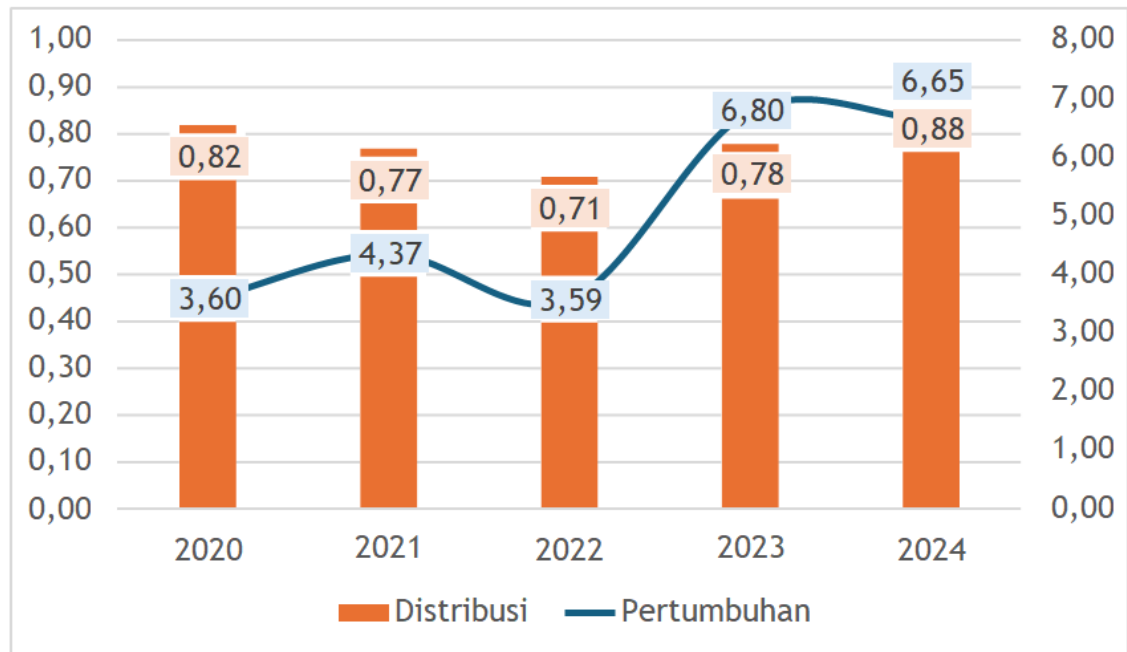
Angka ketergantungan sendiri merupakan indikator demografis yang menggambarkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi rasio ini, semakin berat beban yang harus dipikul oleh kelompok usia produktif dalam memenuhi kebutuhan kelompok non-produktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka ketergantungan antara lain tingkat kelahiran, harapan hidup, serta arus migrasi. Wilayah dengan angka kelahiran tinggi biasanya memiliki angka ketergantungan yang besar karena banyaknya anak-anak yang belum masuk dalam kategori usia produktif. Berikut disajikan data angka ketergantungan di Kabupaten Raja Ampat.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari kemajuan teknologi serta ekosistem inovasi daerah yang kondusif. Perkembangan teknologi dan informasi di suatu wilayah dapat tercermin melalui pertumbuhan sektor-sektor yang mengandalkan pemanfaatan teknologi dalam proses kerjanya, seperti sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menjadi representasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah, karena sektor ini sangat bergantung pada penggunaan teknologi digital yang mutakhir. Bagian ini akan menguraikan sejumlah indikator yang merefleksikan kondisi tersebut, antara lain rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta indeks inovasi daerah di Kabupaten Raja Ampat. Analisis atas indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kemajuan teknologi dan inovasi telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator ekonomi makro yang mengukur seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total produksi ekonomi suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan sektor ini menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi karena dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor industri pengolahan meningkatkan nilai produk daerah dengan mengubah bahan mentah menjadi barang konsumsi akhir. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dengan total PDRB wilayah tersebut, sehingga memberikan gambaran tentang peran sektor ini dalam perekonomian. Berikut adalah data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2020-2024.



Sumber: BPS Raja Ampat, 2025

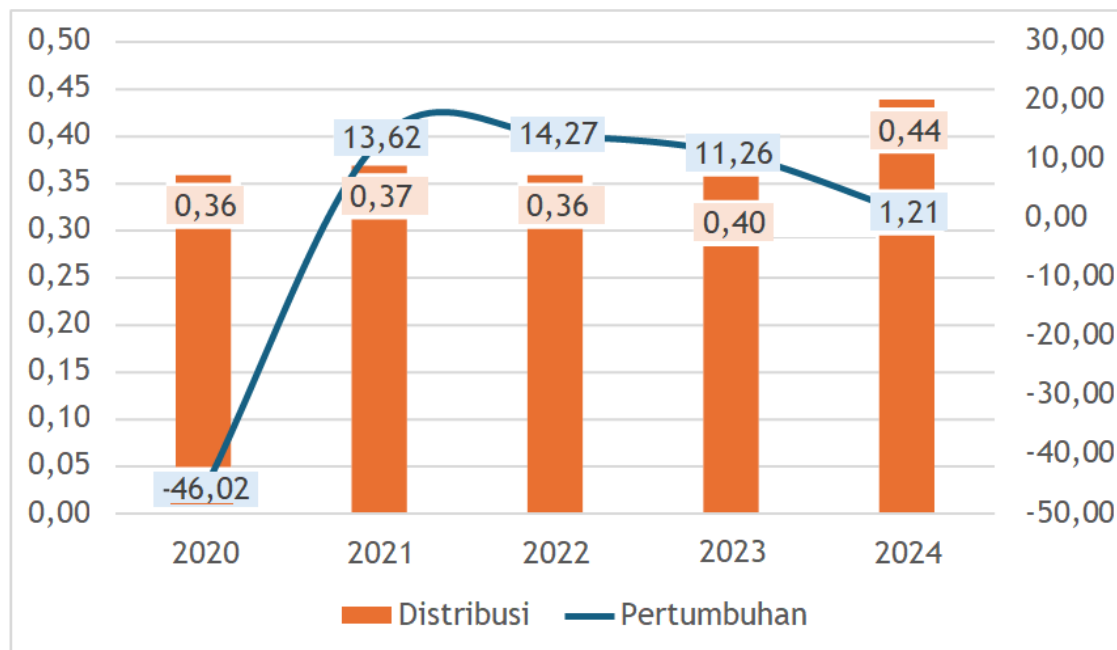
Gambar 2.21. Grafik Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir baik dari aspek distribusi maupun pertumbuhan menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat. Dalam aspek distribusi, terdapat peningkatan sebesar 0,06 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 7,32 persen dibandingkan dengan data awal. Dalam aspek pertumbuhan, peningkatan tercatat cukup signifikan dengan meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 3,05 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 84,72 persen dibandingkan dengan data awal. Hal ini mengindikasikan tumbuhnya sektor industri pengolahan di Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi dengan nilai tambah lebih lanjut melalui pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi.

2.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu indikator penting dalam penghitungan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto yang dihasilkan dari sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB daerah tersebut. Rasio ini memberikan gambaran kontribusi sektor terkait terhadap perekonomian wilayah, terutama yang berkaitan erat dengan

sektor pariwisata dan jasa boga. Melalui rasio ini, dapat diketahui sejauh mana sektor tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap PDRB di Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2020– 2024.



Sumber: BPS Raja Ampat, 2025

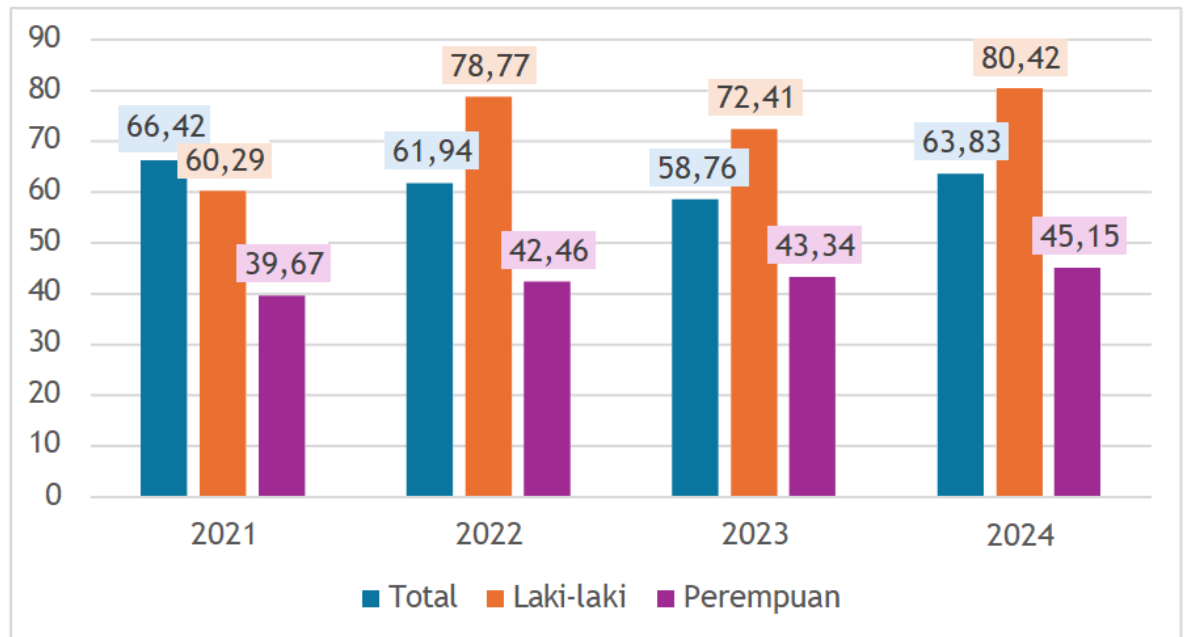
Gambar 2.22. Grafik Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai proksi bagi sektor kepariwisataan daerah menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam aspek pertumbuhan dan peningkatan yang moderat dalam aspek distribusi. Dalam aspek pertumbuhan, peningkatan cukup pesat terjadi sebesar 47,23 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 102,63 persen dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2020. Dalam aspek distribusi terdapat peningkatan moderat dengan pertumbuhan sebesar 0,08 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 22,22 persen. Hal ini menunjukkan pulihnya sektor pariwisata daerah pasca Pandemi Covid-19 yang mana pada tahun 2020 angka pertumbuhan berada di angka minus. Pulihnya sektor pariwisata direfleksikan dari meningkatnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total jumlah penduduk usia kerja di suatu daerah. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, sehingga mencerminkan potensi ekonomi yang besar dari wilayah tersebut. TPAK juga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan dan kapasitas ekonomi suatu daerah. Berikut disajikan data capaian TPAK Kabupaten Raja Ampat dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS Raja Ampat, 2025

Gambar 2. 23. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2024 (Persen)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang menurun. Secara persentase total tercatat sedikit menurun sebesar 2,56 poin dengan persentase penurunan sebesar 3,60 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Meskipun demikian, persentase baik dalam aspek laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. TPAK Laki-Laki daerah menunjukkan peningkatan cukup signifikan sebesar 20,13 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 33,36 persen. TPAK Perempuan daerah menunjukkan peningkatan yang moderat sebesar 5,48 poin dengan persentase peningkatan sebesar 13,81 persen. Meskipun secara proporsi jenis kelamin meningkat, namun menurunnya persentase total mengindikasikan meningkatnya jumlah angkatan kerja daerah yang belum sibarengi dengan meningkatnya kesempatan kerja daerah yang optimal.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa sektor pertambangan dan penggalian dapat digunakan sebagai proxy untuk indikator ekonomi yang lebih ramah lingkungan, karena indikator ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, indikator ini lebih menekankan pada sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti industri manufaktur berbasis teknologi ramah lingkungan, jasa, pertanian berkelanjutan, serta energi terbarukan. Penggunaan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian juga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi hijau, di mana pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Berikut adalah data tentang distribusi PDRB non-pertambangan dan penggalian di Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 2.10 Distribusi PDRB Non-Pertambangan dan Penggalian Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,17	26,03	22,87	23,68	25,24
C	Industri Pengolahan	0,82	0,77	0,71	0,78	0,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
F	Konstruksi	13,46	12,35	10,57	10,63	11,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	4,8	4,36	5,05	6,08
H	Transportasi dan Pergudangan	0,63	0,56	0,51	0,6	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,37	0,36	0,4	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,27	0,24	0,22	0,24	0,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,63	0,56	0,65	0,68
L	Real Estat	0,66	0,66	0,58	0,63	0,73
M, N	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
O	Sosial Wajib	18,02	15,82	14,23	15,22	15,6
P	Jasa Pendidikan	0,65	0,85	0,78	0,6	1,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	0,26	0,24	0,26	0,28
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,25	0,24	0,23	0,25	0,26
Jumlah		70,87	63,63	56,3	56,64	63,7

Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2025

Kontribusi sektor non-pertambangan dan penggalian di Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan sebesar 7,17 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini terjadi karena penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,63 persen, penurunan kontribusi sektor konstruksi sebesar 2,44

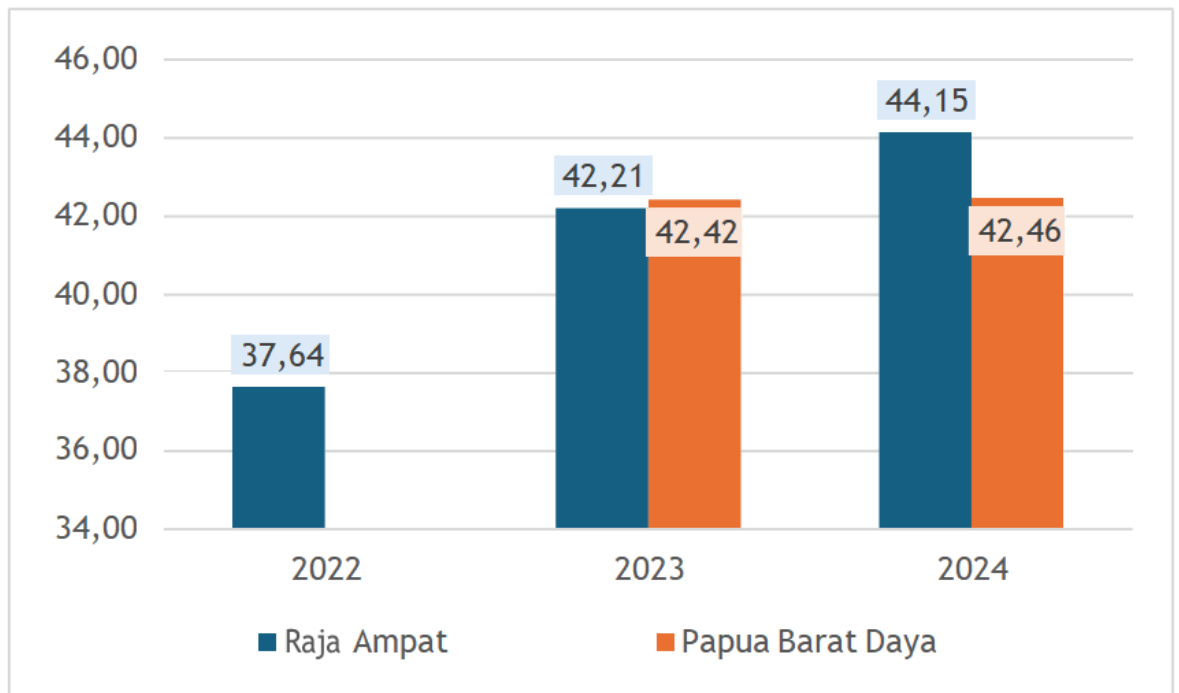
persen dan penurunan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 2,12 persen pada tahun 2020-2024. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian justru meningkat sebesar 7,16 persen pada periode tahun yang sama. Kontribusi sektor non- pertambangan dan penggalian harus ditingkatkan secara berkesinambungan agar pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dapat berjalan secara berkesinambungan.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital kini menjadi salah satu syarat utama dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi serta optimalisasi pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital dapat menciptakan efisiensi dalam aktivitas ekonomi di tingkat daerah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Digitalisasi telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis lebih dalam proses transformasi digital suatu daerah guna memahami sejauh mana tingkat digitalisasi yang telah dicapai. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi ini adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat perkembangan masyarakat digital di suatu wilayah. IMDI disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan, keterampilan, serta lapangan kerja. Keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk dan memperkuat masyarakat digital di Indonesia. Berikut ini disajikan kondisi masyarakat digital di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan pengukuran IMDI.



Sumber: Buku IDMI 2022-2024

Gambar 2.24. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024 (Nilai)

IDMI Kabupaten Raja Ampat tercatat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan terjadi sebesar 6,51 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 17,30 persen dibandingkan dengan kondisi awal data. Peningkatan ini terjadi lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi di level provinsi. Sebagai informasi, data di level provinsi baru tersedia pada tahun 2023 disebabkan oleh status Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru. Peningkatan di level provinsi terjadi sebesar 0,04 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 0,06 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan di level kabupaten menjadikan kondisi masyarakat digital di Kabupaten Raja Ampat lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada di level provinsi, dimana hal ini mengindikasikan masyarakat Raja Ampat secara rata-rata sudah lebih baik dalam mengadopsi teknologi digital dibandingkan rata-rata provinsi secara umum.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kondisi perekonomian yang optimal memerlukan hubungan yang kuat antara pasar domestik dengan eksternal, dalam hal ini pasar global. Era globalisasi menghasilkan banyak potensi ekonomi baru dengan membuka peluang pasar bagi pelaku-pelaku ekonomi lokal dan domestik. Bagian ini akan melihat kondisi

keterkaitan antara perekonomian lokal dengan perekonomian global melalui data pembentukan modal tetap bruto.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang dilakukan dalam bentuk penambahan, perbaikan, atau penggantian aset tetap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Aset tetap yang dimaksud mencakup barang-barang berumur panjang yang digunakan dalam proses produksi, seperti bangunan, infrastruktur, mesin-mesin industri, kendaraan operasional, serta peralatan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. PMTB menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi peningkatan produktivitas dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data PMTB Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 2.11. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Raja Ampat (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	557,45	617,38	640,12	606,65	563,62

Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2025

Pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan sebesar 36,47 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini terjadi karena semakin meningkatnya investasi yang masuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat. Peningkatan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan juga merupakan beberapa faktor yang berpengaruh pada peningkatan PMTB di Kabupaten Raja Ampat. PMTB harus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa merupakan selisih antara nilai total ekspor dan impor barang serta jasa yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian suatu daerah dan menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan

pendekatan pengeluaran. Net ekspor yang bernilai positif menunjukkan bahwa suatu negara atau wilayah memiliki surplus perdagangan, di mana nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, sehingga terjadi aliran devisa masuk yang dapat memperkuat perekonomian domestik. Sebaliknya, net ekspor yang bernilai negatif mengindikasikan defisit perdagangan, di mana impor lebih besar dari ekspor, yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk luar negeri dan berpotensi melemahkan neraca pembayaran. Dalam konteks pembangunan ekonomi, net ekspor barang dan jasa menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu negara di pasar global, ketahanan ekonomi terhadap perubahan perdagangan internasional, serta efektivitas kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor dan pengelolaan impor secara berkelanjutan. Berikut adalah data tentang net ekspor barang dan jasa Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 2.12. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Raja Ampat (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	382,17	736,5	1.168,80	1.003,68	651,82

Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2025

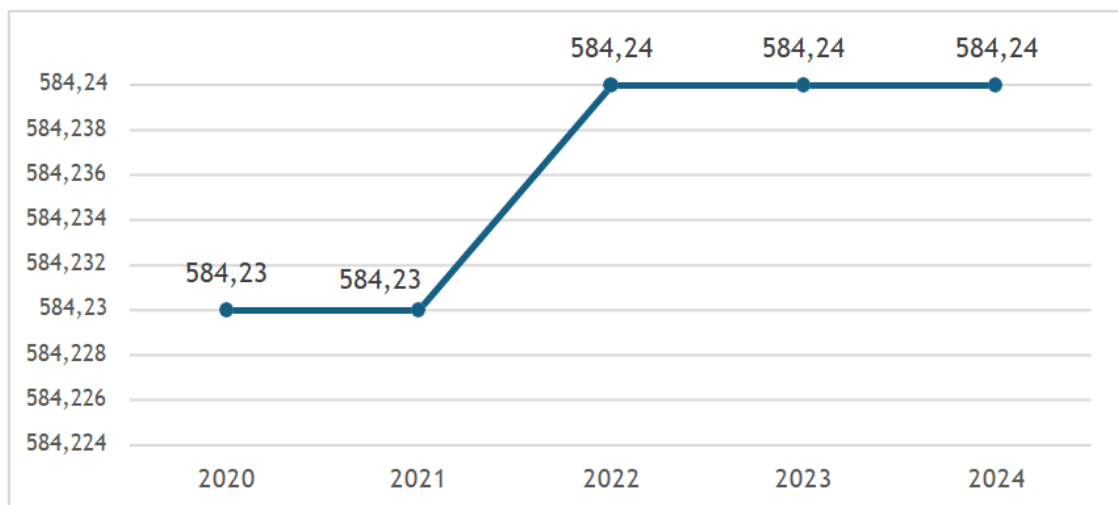
Net ekspor barang dan jasa Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan sebesar 266,65 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Net ekspor barang dan jasa ini meningkat karena terjadi peningkatan ekspor barang dari dalam menuju ke luar Kabupaten Raja Ampat. Komoditas yang sering diekspor dari Kabupaten Raja Ampat umumnya berupa komoditas perikanan. Ekspor barang dan jasa di Kabupaten Raja Ampat harus ditingkatkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan tidak akan terlepas dari dukungan kemantapan konektivitas wilayah. Secara lebih rinci, kondisi konektivitas wilayah dapat digambarkan melalui infrastruktur jalan dan perhubungan di Kabupaten Raja Ampat. Infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah dan memberikan dukungan terhadap sektor transportasi darat saja, namun juga memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya peningkatan pembangunan ekonomi. Keberadaan infrastruktur jalan yang selanjutnya dapat memberi dukungan terhadap kegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa serta pengembangan wilayah menjadi representasi fungsi infrastruktur jalan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Keberadaan jalan memberikan keselarasan dan kesesuaian pertumbuhan wilayah - wilayah regional,

kawasan perkotaan, dan kawasan distrik.

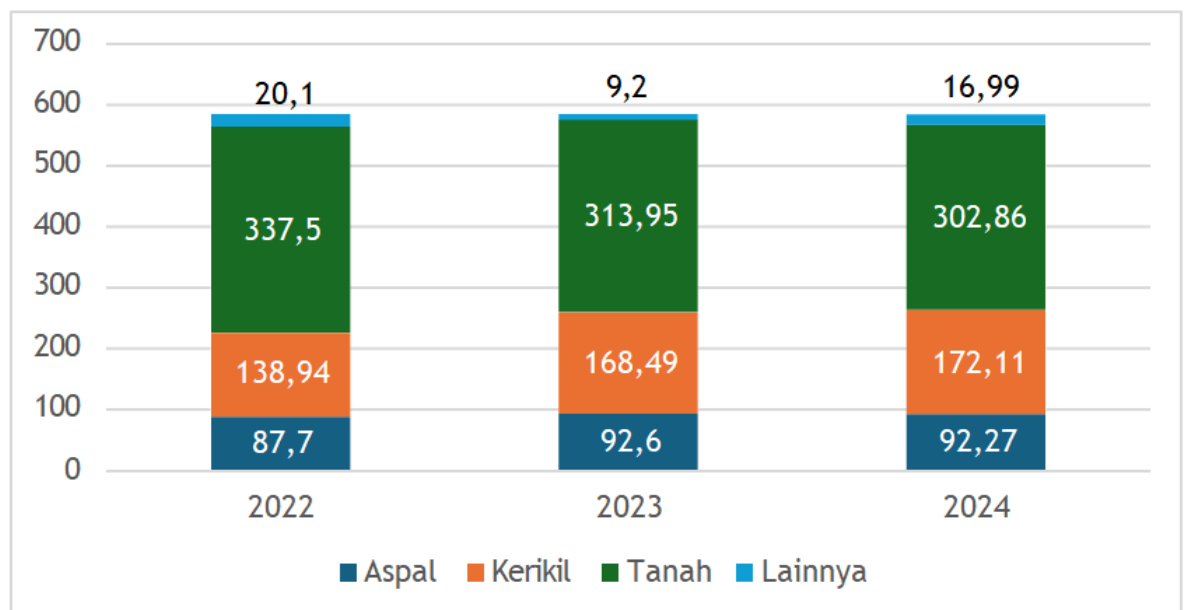
Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu daerah destinasi wisata nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2024. Amanah dalam peraturan tersebut mempertimbangkan potensi Kabupaten Raja Ampat yang memiliki peran strategis dan berkelanjutan untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata nasional. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka aspek infrastruktur jalan menjadi salah satu komponen yang penting, khususnya dalam akselerasi optimalisasi pengembangan wisata di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi wisata nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2021-2025

Gambar 2.25. Panjang jalan menurut kewenangan kabupaten di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020-2024

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Raja Ampat mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022. Kondisi tersebut menjadikan perlunya intervensi yang perlu untuk semakin ditingkatkan, dengan tujuan tidak hanya pemenuhan akses namun juga menitikberatkan pada kualitas dari jalan tersebut, terlebih lagi dapat memberikan dampak ikutan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat. Terlebih lagi, sebagai salah satu destinasi wisata nasional, ruas – ruas jalan yang mendukung akses pariwisata di Kabupaten Raja Ampat perlu untuk mempertimbangkan aspek yang ramah lingkungan. Dengan demikian penyediaan jalan di Kabupaten Raja Ampat tidak hanya berhenti pada akses dan pendukung perekonomian saja, namun lebih jauh lagi memastikan terimplementasinya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat. Berikut disajikan jenis permukaan jalan di Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 2022-2024.

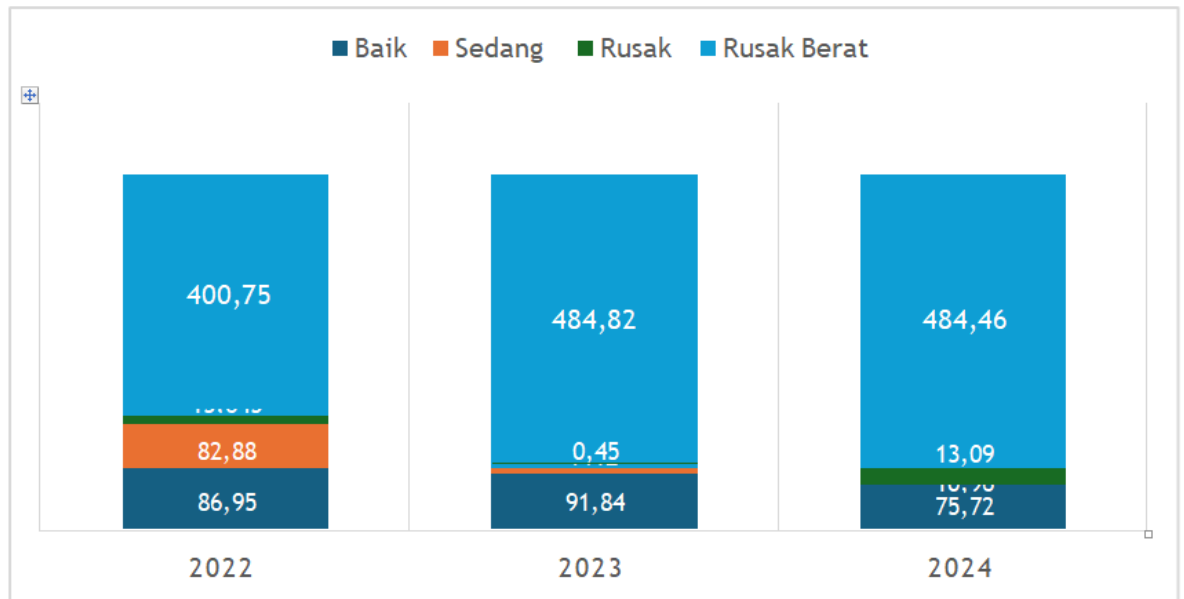


Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2025

Gambar 2.26. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2024 (km)

Panjang jalan menurut kondisi permukaannya terklasifikasikan dalam jalan beraspal, berkerikil, tanah dan permukaan yang kondisinya tidak dirinci. Proporsi dengan kondisi permukaan jalan tanah mendominasi di bandingkan dengan proporsi yang lainnya. Artinya, panjang jalan beraspal di Kabupaten Raja Ampat masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya dalam mendukung akses yang nyaman menuju destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat.

Pemeliharaan dan peningkatan jalan ditujukan agar kualitas layanan pemakaian jalan bagi pengendara jauh lebih baik. Pemeliharaan jalan ini termasuk mempertahankan, memperbaiki, menambah ataupun mengganti bentuk fisik yang telah ada agar tetap dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Lebih lanjut lagi, panjang jalan menurut kondisinya di Kabupaten Raja Ampat tahun 2022-2024 disajikan sebagai berikut ini.



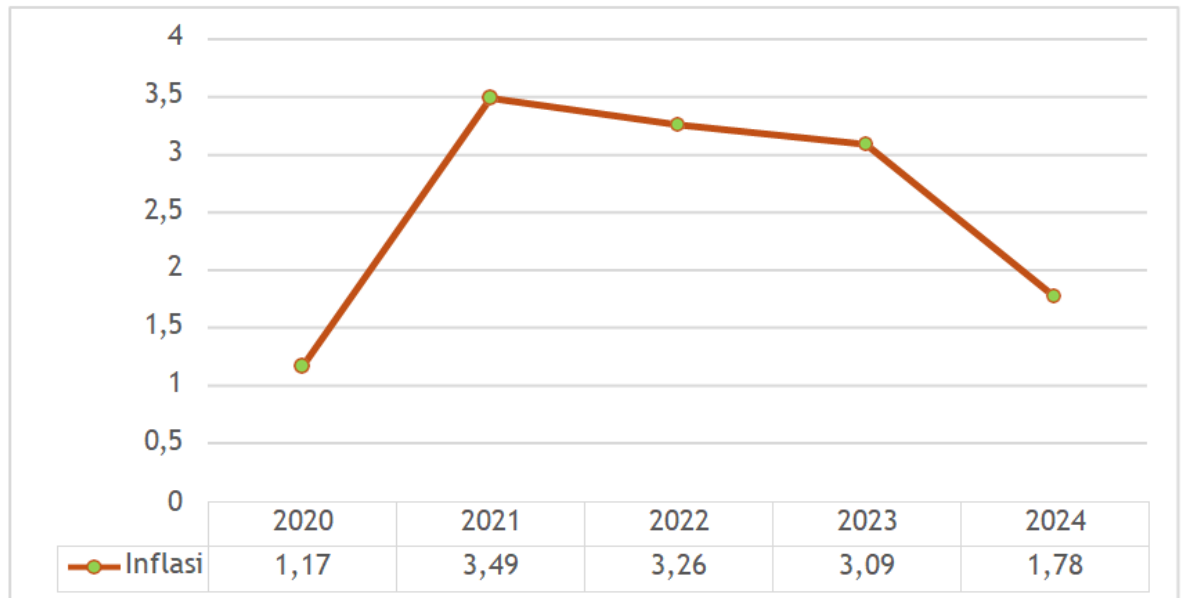
Sumber: BPS Kabupaten Raja Ampat, 2025

Gambar 2.27. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2022-2024 (km)

Proporsi panjang jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Raja Ampat mendominasi, artinya kualitas jalan di Kabupaten Raja Ampat masih perlu untuk dioptimalkan intervensinya dengan tujuan proporsi kondisi jalan baik semakin meningkat. Kondisi ini tentu perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan guna mendukung konektivitas Raja Ampat yang semakin mantap.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti tingkat inflasi. Data inflasi di Kabupaten Raja Ampat belum tersedia secara series dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Sementara data inflasi Kabupaten Raja Ampat menggunakan data inflasi di Kota Sorong secara umum. Berikut adalah data inflasi Kabupaten Raja Ampat yang mengacu pada data inflasi Kota Sorong.



Sumber: BPS Kota Sorong, 2025

Gambar 2.28. Grafik Inflasi Kota Sorong Tahun 2020-2024

Inflasi Kabupaten Raja Ampat yang mengacu pada data inflasi Kota Sorong mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin pada tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan inflasi ini terjadi karena beberapa faktor seperti tingginya biaya distribusi barang perdagangan, belum optimalnya rantai pasok distribusi perdagangan dan hampir semua barang diimpor dari luar daerah. Inflasi berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu indikator ini harus menjadi perhatian bersama dan mendapatkan intervensi kebijakan yang tepat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup berbagai kondisi dan pencapaian dalam pelaksanaan kinerja tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Kondisi tata kelola pemerintahan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah secara keseluruhan dengan menciptakan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, serta lincah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dikarenakan posisinya sebagai fondasi pembangunan daerah, penggambaran kondisi tata kelola pemerintahan melalui indikator tertentu menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi tata kelola pemerintahan di suatu daerah.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kondisi tersebut menggambarkan pertukaran informasi publik yang terbuka, transparan serta

mematuhi kerangka hukum. Lebih lanjut lagi, kinerja yang dapat merepresentasikan capaian dari aspek ini mencakup, indeks reformasi hukum, indeks SPBE, indeks pelayanan publik dan indeks integritas nasional.

Indeks reformasi hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel dan sesuai dengan target reformasi birokrasi. IRH juga berfokus pada penguatan sistem regulasi nasional dan daerah. Dengan demikian, IRH menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola hukum yang lebih merata. Kondisi IRH yang baik dapat diupayakan, diantaranya, memperkuat koordinasi antara lembaga terkait untuk harmonisasi regulasi, mendorong reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, menyederhanakan regulasi pada setiap jenjang peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan.

Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Era digitalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi tata kelola pemerintahan saat ini. Di satu sisi, teknologi memungkinkan peningkatan kualitas pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, namun di sisi lain, tantangan yang muncul termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarana teknologi yang memadai serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan publik.

Dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, tingkat penerapan pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi Papua Barat (2,04 pada Tahun 2021) masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Raja Ampat (1,22 Tahun 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat masih perlu ditingkatkan ke depan untuk memastikan pelayanan publik yang responsif dan lincah dalam menjawab ekspektasi, tantangan dan tuntutan dari masyarakat luas.

Indeks pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan kinerja utama pemerintah terhadap masyarakat. Kondisi pelayanan publik suatu daerah dapat digambarkan oleh indikator indeks pelayanan publik yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tingginya nilai indeks pelayanan publik suatu daerah mengindikasikan birokrasi yang adaptif terhadap berbagai ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diharapkan.

Indeks pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat masih menunjukkan kondisi pelayanan publik yang belum optimal. Pada tahun 2021, indeks pelayanan publik Kabupaten Raja Ampat menunjukkan capaian dengan predikat C-, dimana capaian ini berada di bawah capaian pelayanan publik Pemerintah Kota Sorong yang memiliki capaian dengan predikat C dan capaian pelayanan publik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang memiliki capaian dengan predikat B. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi pelayanan publik di Kabupaten Raja Ampat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pelayanan publik Kabupaten Raja Ampat memiliki daya saing dengan daerah sekitarnya.

Indeks integritas nasional

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Tujuan dari pengukuran indikator ini diharapkan dapat mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek pelayanan umum mencakup juga penerapan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial di Kabupaten Raja Ampat. Dalam hal ini, hukum berkeadilan untuk setiap warga negara – termasuk masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang di Raja Ampat, harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hukum berkeadilan ini untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal dilindungi terutama dalam konteks tata kelola sumber daya alam dan pariwisata yang seringkali kurang memperhatikan hak masyarakat lokal dan memicu konflik.

Upaya perlindungan terhadap hak masyarakat Adat di Raja Ampat dilakukan diantaranya dengan menyusun draf perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Draf perda ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Raja Ampat seperti pengakuan hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya. Pemerintah daerah Raja Ampat memfasilitasi berbagai upaya untuk melindungi keberadaan masyarakat adat melalui peraturan-peraturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sejak 2012, di antaranya mencakup

(1) Perda No. 6 tahun 2012 terkait pengelolaan sumber daya laut berupa larangan menangkap ikan tertentu dan perlindungan biota disertai sanksi adat dan penyerahan kepada kepolisian bagi pelanggar; (2) Perbup Raja Ampat No. 8 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan ikan, biota laut dan sumber daya alam di pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja Ampat; dan (3) Perda No. 6 Tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah Raja Ampat 2021-2036, yang menekankan adanya pengelolaan adaptif meliputi pengelolaan destinasi pariwisata yang menjaga nilai-nilai budaya dan hukum adat dan adat kebiasaan masyarakat lokal, serta pengelolaan destinasi pariwisata yang memberikan perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, dan penghargaan dan/atau penghormatan kepada orang asli Papua.

Sedangkan penegakan hukum di Raja Ampat terus diupayakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Kecepatan dan ketepatan penanganan dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan oleh ke kepolisian Raja Ampat dari masyarakat yang makin meningkat dalam tindak penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2.13. Jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Kepolisian Sektor di Raja Ampat

Kepolisian Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
	Tindak Pidana dilaporkan	Tindak Pidana diselesaikan	Tindak Pidana dilaporkan	Tindak Pidana diselesaikan	Tindak Pidana dilaporkan	Tindak Pidana diselesaikan	Tindak Pidana dilaporkan	Tindak Pidana diselesaikan	Tindak Pidana dilaporkan	Tindak Pidana diselesaikan
1. Polres Raja Ampat	110	44	83	44	151	122	144	111	142	115
2. Polsek Waigeo Selatan	3	1	33	30	7	–	10	7	10	7
3. Polsek Waigeo Utara	1	–	–	–	13	13	14	13	2	2
4. Polsek Misool	5	2	–	–	12	6	11	7	8	6

Sumber data: Raja Ampat dalam Angka 2025, hlm. 135-13c

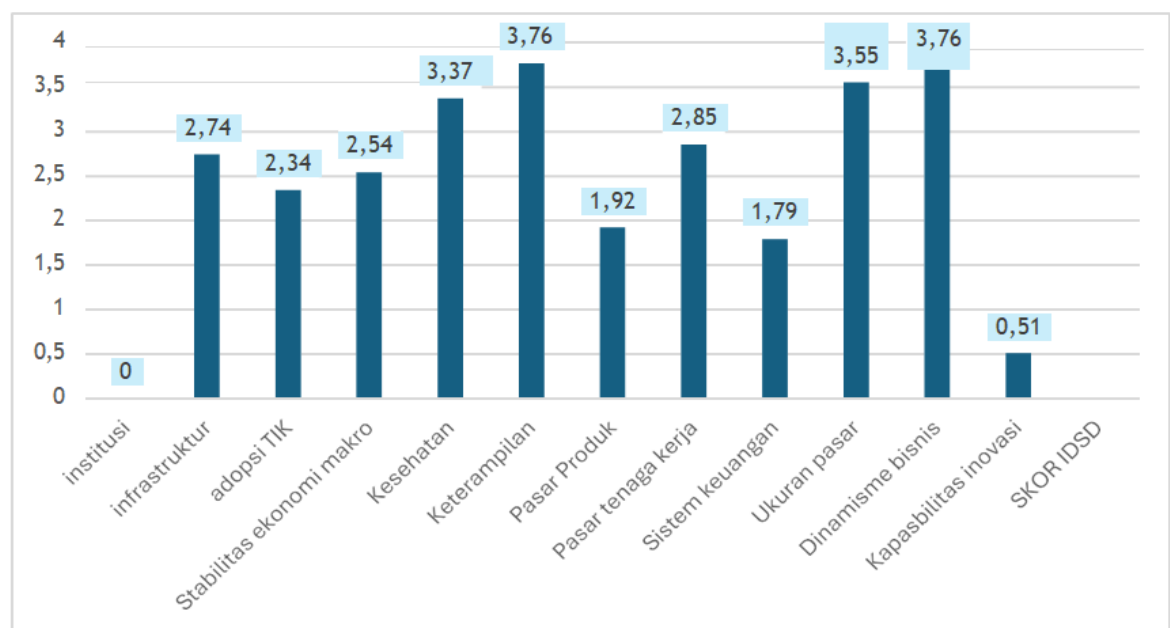
Untuk keamanan nasional yang tangguh di Raja Ampat, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, budaya lokal dan stabilitas sosial adalah hal yang tidak terpisahkan. Ancaman seperti pencurian sumber daya alam dan eksploitasi pariwisata yang tidak bertanggung jawab harus ditangani dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Raja Ampat bekerjasama dengan aparat yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan dari permasalahan terkait ancaman tersebut. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman bagi warga negara sekaligus melindungi ekosistem yang menjadi sumber kehidupan. Sedangkan stabilitas sosial terus dilakukan melalui dialog dan mediasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok adat dalam membantu meredakan ketegangan dan kerjasama antar kelompok yang ada di Raja Ampat.

Sebagai contoh, pemerintah daerah memfasilitasi asosiasi usaha pariwisata masyarakat adat dalam mendorong dan mengembangkan kerjasama sekaligus pemberdayaan masyarakat adat dalam kepariwisataan.

Demokrasi substansial di Kabupaten Raja Ampat memiliki maksud bahwa warga negara (citizen) tidak hanya memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam rangkaian proses demokrasi elektoral, tetapi juga difasilitasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendorong program-program pendidikan pemilih agar masyarakat dapat memahami peran mereka dalam demokrasi.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

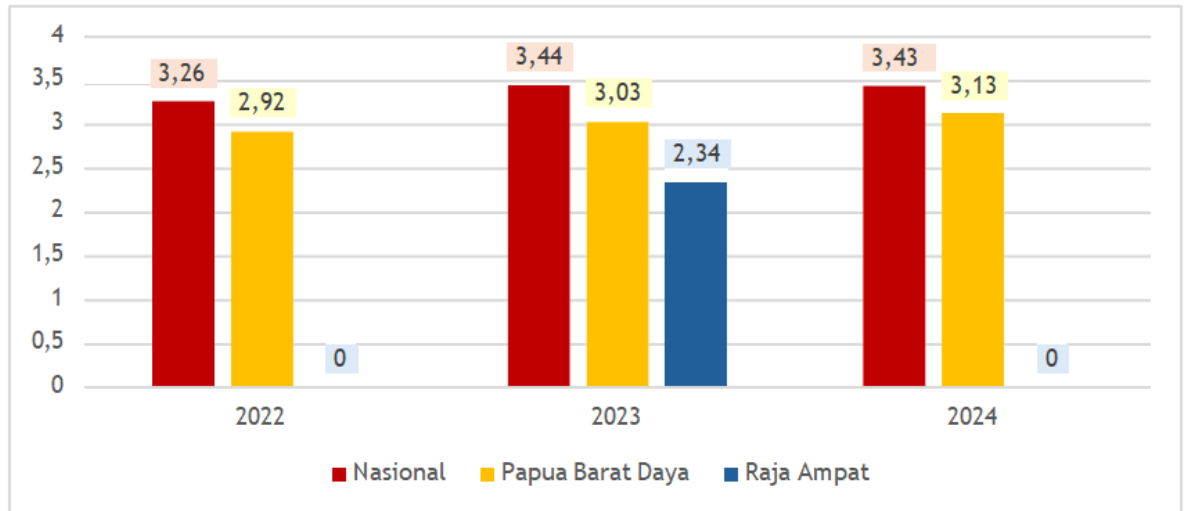
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan saing dicerminkan melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Dalam konteks daerah atau dalam hal ini Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:



Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024

Gambar 2.29. Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Raja Ampat 2024

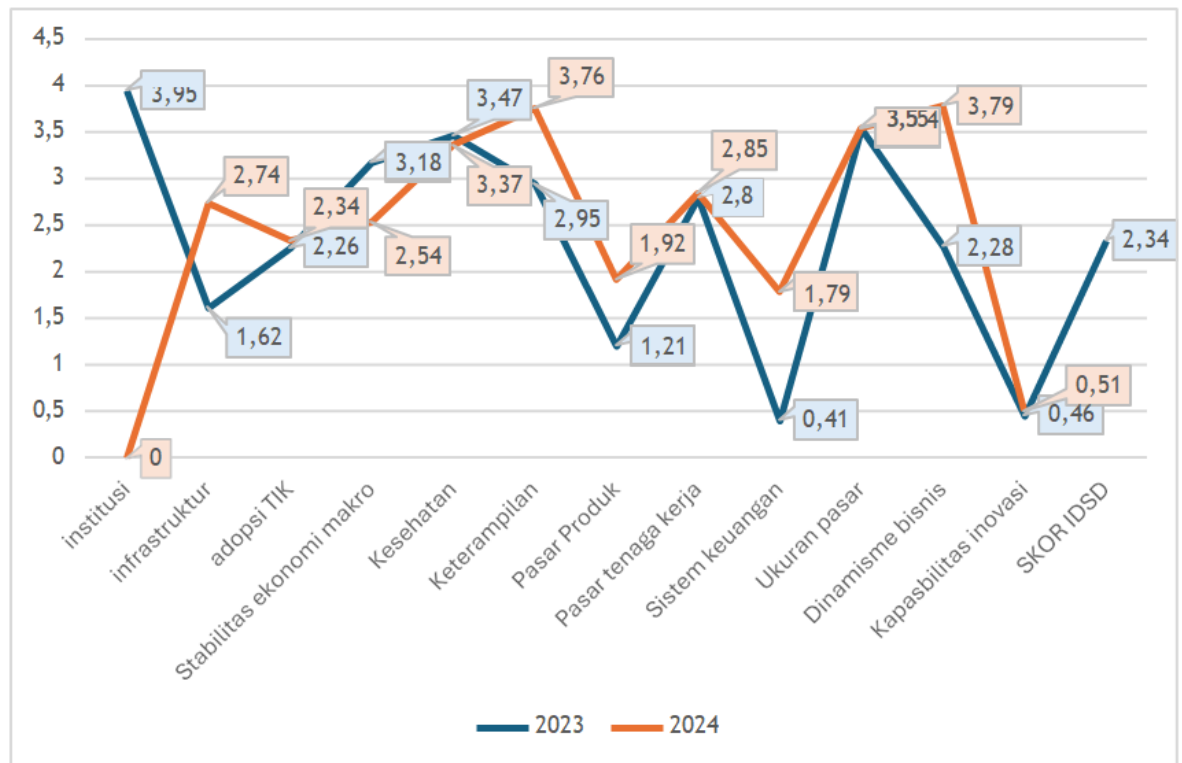
Skor IDSD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2024 tidak dapat dilihat nilainya, hal ini dikarenakan pilar 1 yaitu pilar institusi untuk kabupaten Raja Ampat tidak memiliki nilai, hal ini berdampak pada skor akhir IDSD Kabupaten Raja Ampat yang tidak dapat dihitung. Pada tahun 2024 pilar keterampilan dan dinamisme biskin memiliki skor tertinggi dengan skor 3,76. Disisi lain kapabilitas inovasi kabupaten Raja Ampat masih sangat rendah dengan skor 0,51.



Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2022-2024

Gambar 2.30. Skor Indeks Daya Saing Daerah

Jika dibandingkan dengan level nasional dan provinsi, pada tahun 2023 skor IDSD Kabupaten Raja Ampat masih memiliki nilai terendah yaitu 2,34. Pada tahun 2023 dan 2024 skor IDSD Kabupaten Raja Ampat tidak dapat dilihat, hal ini diakibatkan karena ada kekosongan pada skor infrastruktur. Perbandingan capaian skor IDSD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih detail dapat dilihat melalui grafik berikut:



Sumber: Diolah dari Indeks Daya Saing Daerah 2023 dan 2024

Gambar 2.31. Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2023-2024

Daya saing Kabupaten Raja Ampat 2024 yang diukur dengan IDSD tidak dapat dilihat, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 nilai pada pilar infrastruktur tidak ditemukan. Dengan melihat perbandingan kedua tahun tersebut pilar institusi, keterampilan, dan dinamisme bisnis mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Secara umum skor pada setiap pilar komponen IDSD Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan pada tahun 2024.

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024. Indikator tersebut sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini disajikan tabel indikator kinerja utama daerah tahun 2024.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Capaian 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	66,60
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,83
3	Indeks Gini	Nilai	0,351
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,39
5	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	0,41
6	PDRB Per Kapita	Juta/Rupiah	58,58
7	Indeks Desa/Kampung	Nilai	0,00
8	Kontribusi pendapatan Sektor Wisata terhadap PAD	persen	58,50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	81,91
10	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145,76
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Nilai	B
12	Rasio konektivitas	Persen	
13	Indeks infrastruktur	Persen	
14	Rasio pertumbuhan PAD	Persen	11,21

2.6 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan tahun 2024 yang menjadi dasar penentuan isu strategis berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal;
2. Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga;
3. Indeks Literasi Masyarakat belum optimal;
4. Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal
5. Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif;
6. Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal;
9. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata.

Isu Strategis

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat menuju terwujudnya Sumberdaya Manusia yang unggul dan berdaya saing;
2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk;
3. Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi lokal;
4. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang serta pengelolaan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Papua Barat Daya, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Papua Barat Daya yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Raja Ampat. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada perubahan yang dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai

level 2,8% atau 0,5 percentage point lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi kebawah sebesar 0,4%, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.

Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan. Dengan gejolak global tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan beberapa asumsi utama yang menjadi landasan penyusunan anggaran dan kebijakan ekonomi. Asumsi-asumsi ini juga menjadi acuan bagi pelaku pasar dan investor dalam memprediksi arah ekonomi Indonesia. Di bawah ini adalah asumsi makro ekonomi kunci untuk 2026. (*Portal Kemenkeu RI, 2025*)

- a. Pertumbuhan Ekonomi — Diproyeksikan berada dikisaran 5,2% hingga 5,8%, sebagai target dasar dalam perencanaan fiskal dan harapan pertumbuhan konsumsi serta investasi.
- b. Inflasi — Diharapkan terkendali antara 1,5% sampai 3,5%, menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil dan memberikan ruang bagi kebijakan suku bunga.
- c. Nilai Tukar Rupiah — Diperkirakan bergerak antara Rp.16.500,- sampai Rp16.900,- per dolar Amerika, mencerminkan ekspektasi stabilitas dan penyesuaian terhadap kondisi global.
- d. Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun — Diasumsikan berada pada rentang 6,6% hingga 7,2%, yang mempengaruhi biaya utang pemerintah dan daya tarik instrumen investasi berbasis obligasi.
- e. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) — Dipatok di level US\$60 hingga US\$80 per barel, sebagai acuan penerimaan dari sektor energi dan perencanaan subsidi energi.
- f. Lifting Minyak — Target produksi minyak mentah nasional berada di kisaran 600.000 hingga 605.000 barel per hari, yang menentukan kontribusi sektor migas terhadap APBN.

- g. Lifting Gas Bumi — Ditetapkan antara 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari, sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan energi.
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka — Diperkirakan berkisar 4,44% hingga 4,96%, yang menjadi indikator kesehatan pasar tenaga kerja nasional.
- i. Rasio Gini — Ditetapkan antara 0,377 hingga 0,380, menunjukkan fokus pemerintah untuk mengendalikan ketimpangan distribusi pendapatan.
- j. Tingkat Kemiskinan — Target ditetapkan pada kisaran 6,5% hingga 7,5%, dengan ambisi menghilangkan kemiskinan ekstrem (target 0%).
- k. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) — Diharapkan meningkat ke angka 0,57, sebagai gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing jangka panjang.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya

Perekonomian Provinsi Papua Barat Daya pada 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,6 persen secara kumulatif (c-to-c) jika dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Papua Barat Daya ditopang oleh perbaikan kinerja seluruh lapangan usaha.

PDRB Papua Barat Daya atas dasar harga berlaku tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 37,04 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebanyak Rp. 24,87 triliun. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja perekonomian Papua Barat Daya dari tahun sebelumnya. Ada tiga lapangan usaha penggerak perekonomian Papua Barat Daya mengalami pertumbuhan positif, yaitu industri pengolahan 4,63 persen (c-to-c), konstruksi 2,06 persen (c-to-c), dan perdagangan 6,65 persen (c-to-c). Industri pengolahan memberikan andil sebesar 17,74 persen terhadap PDRB Papua Barat Daya, kemudian jasa konstruksi dengan andil 14,43 persen, dan lapangan usaha perdagangan menyumbang 14,03 persen. Selama tahun 2024, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,82 persen (c-to-c).

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Papua Barat Daya ditopang oleh komponen ekspor barang jasa dengan andil 49,97 persen, dan komponen konsumsi rumah tangga dengan andil 47,30 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada periode 2024, yaitu konsumsi lembaga non-profit (LNPR) 13,08 persen (c-to-c) diikuti konsumsi rumah tangga 4,63 persen (c-to-c).

Secara tahunan, ekonomi Papua Barat Daya triwulan IV tahun 2024 tumbuh 2,59 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2023.

Proyeksi indikator makro ekonomi Provinsi Papua Barat Daya untuk tahun 2026 belum tersedia secara spesifik dalam informasi yang tersedia. Namun,

berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat (yang meliputi Papua Barat Daya) pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,35%.

Beberapa indikator makro ekonomi yang perlu diperhatikan terkait proyeksi ini meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi - Target 5,35% pada tahun 2026, yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- b. Inflasi - Perlu diperhatikan tingkat inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- c. Tingkat Pengangguran - Target penurunan angka pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pendapatan per Kapita - Ukuran pendapatan per kapita, baik GNP maupun PDRB, juga merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi instrumen penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- a. Potensi Sumber Daya Alam, Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi pertambangan (emas, tembaga, minyak bumi, gas alam) dan perikanan yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Pariwisata, Keindahan alam Raja Ampat dan potensi wisata lainnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
- c. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung kegiatan ekonomi dan investasi.
- d. Kebijakan Pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat akan berperan penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, reformasi tata kelola, dan pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, dengan tetap memperhatikan koridor Otonomi Khusus. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian atau fokus pembangunan adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk mendukung transformasi dan pembangunan berkelanjutan.
- b. Reformasi Tata Kelola, reformasi tata kelola pemerintahan daerah diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- c. Pengembangan Ekonomi Inklusif, pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, terutama Orang Asli Papua, menjadi fokus utama.
- d. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, aktivitas masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.
- e. Otonomi Khusus, pembangunan harus selaras dengan kebijakan Otonomi Khusus dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Raja Ampat

Salah satu permasalahan dalam bidang ekonomi yang dialami oleh Kabupaten Raja Ampat dalam jangka panjang adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Meskipun pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Raja Ampat berkontraksi sebesar -2,28 persen. Kabupaten Raja Ampat memiliki rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sebesar 4,22 persen setiap tahunnya. Beberapa hal lain yang menjadi penyebab belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yaitu Produktivitas ekonomi daerah masih volatil, Ketimpangan pendapatan masih fluktuatif, Tingkat inflasi belum terjaga, dan Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja daerah.

Kondisi ketimpangan daerah yang digambarkan melalui indeks gini. Indeks gini Kabupaten Raja Ampat menunjukkan penurunan sebesar 0,009 poin atau persentase penurunan sebesar 2,50 persen dari kondisi awal pada tahun 2014. Kondisi ini menempatkan kinerja Kabupaten Raja Ampat dalam hal ketimpangan berada di atas angka nasional yang memiliki tren peningkatan sebesar 0,037 poin atau persentase.

Kondisi inflasi di Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat melalui data dari wilayah terdekat, yaitu Kota Sorong. Inflasi di Kota Sorong terjadi dengan rata-rata per bulan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata inflasi sebesar 0,56 per bulannya, dan tahun 2020 menjadi tahun dengan rata-rata inflasi bulanan terendah dengan angka sebesar 0,10 persen setiap bulannya.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Raja Ampat, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Papua Barat Daya, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan,

stunting, pengembangan ekonomi local - kerakyatan serta investasi dan pengembangan infratraktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Raja Ampat juga difokuskan pada Peningkatan Konektivitas wilayah dan tata Kelola yang baik dalam mendukung rantai pasok dan layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga nmenjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi lokal-kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Raja Ampat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat

untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DAU

Infrastruktur, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan bantuan keuangan Provinsi.

- c) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
- 2) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 7) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (0,75%);
- 2) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan,

- Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pemenuhan program prioritas daerah yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
 - 4) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
 - 5) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- b) Prioritas
- c) Tolok Ukur dan target Kinerja
- d) Optimalisasi Belanja Modal
- e) Transparan dan Akuntabel
- f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
- g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan.

3.2.2.1. Belanja Operasi

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, adapun kebijakannya adalah :

- 1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- 2) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta rekrutmen pegawai PPPK formasi 2024;
- 3) Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan paling tinggi 30% (tigapuluh persen) dari total APBD, jika telah melebihi 30%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai.
- 4) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.1.3. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2. **Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu kali periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta

pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

3.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat Mandatory Spending, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya P3K disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU earmark).

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029; (2) RTRW Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, (3) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (5) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Papua Barat Daya guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 direpresentasikan dengan tema pembangunan “**Peningkatan konektivitas wilayah dan tata kelola yang baik, serta penataan kota dalam mendukung rantai pasok, aksesibilitas layanan dasar, dan pengembangan wisata berkelanjutan**”. Tema Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki sektor ekonomi riil. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan yang lebih konkrit pada sektor ekonomi riil, baik infrastruktur perhubungan, Koperasi dan UKM maupun IKM. Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas perikanan serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani/kelompok ternak. Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan dan usaha kecil menengah.

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah. "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur
 - b. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
 - c. Penguatan koperasi
 - d. Mengembangkan industri kreatif
 - e. Pendalaman sektor keuangan.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :
 - a. membangun desa dan membangun dari desa
 - b. pemerataan ekonomi
 - c. Memberantas kemiskinan

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :

- a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis
- b. Melestarikan budaya
- c. Penanganan bencana.

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, reformasi tata kelola, pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta mendorong inovasi dan pengembangan kawasan pertumbuhan di wilayah tersebut.

Adapun Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 sebagai berikut :

1. PDRB per kapita (Rp Juta)	:	82,26-85,32
2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	:	18,53-19,58
3. Tingkat Kemiskinan (%)	:	15,63-16,07
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	5,99-6,39
5. Rasio Gini (indeks)	:	0,3-0,08
6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	:	0,18
7. Indeks Modal Manusia (indeks)	:	0,5
8. Pertumbuhan Ekonomi	:	3,8-4,5
9. Tingkat Inflasi	:	2,4-3,4
10. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	:	5,48
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	:	83,19

Tabel 4.1. Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2026
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	6.813
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	88,75
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,59-49,71
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	8,74
Indeks Inovasi Daerah	26,94
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,5
Indeks Pelayanan Publik	2,83-62,27

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026

URAIAN	SATUAN	2026
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
Indeks Risiko Bencana (IRB)* Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	206,91
Kumulatif	Persen	8,1
Tahunan	Persen	29,05
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	0,16
Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Persen	85,9
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	6,15
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
PDRB per kapita	Rp Juta	82,26-85,32
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Persen	88,75
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Persen	79,29
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,85-0,86
Tingkat Kemiskinan	Persen	15,63-16,07
Rasio Gini (indeks)	Persen	0,36-0,367
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	26,94
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Persen	8,74
Indeks Inovasi Daerah	Persen	26,94
Indeks Modal Manusia	Persen	0,5
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	5,48
Rasio PDRB Industri Pengolahan Pengembangan Pariwisata:	Persen	18,06-19,07
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *	Persen	0,32
b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	Persen	6.813
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,99-6,4
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	6,5
Realisasi Investasi (PMA-PMDN)	Rp Triliun	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	62,44

URAIAN	SATUAN	2026
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	0,46
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,82
<i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD *	Persen	0,35
Tingkat Inflasi	Persen	2,32-3,38
Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Persen	
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB *	Persen	17,46
Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,43
Nilai Transaksi Saham Per Provinsi	Persen	1.749.958
Total Kredit/PDRB	Persen	16,57
Inklusi Keuangan	Persen	21,98
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,79
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,79
Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis)	Persen	150,04
Kesehatan Ibu dan Anak:	Persen	
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	202,34
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Penanganan Tuberkulosis	Persen Per 100.000 Penduduk	13,26
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) *	Persen	90
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) *	Persen	85
Penanganan HIV/AIDS	Persen	3326,06
Jumlah cakupan Kab/Kota yang bebas malaria	Persen	1,09
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Hasil pembelajaran	Persen	99,5
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
Literasi Membaca	Persen	20,84
Numerasi	Persen	4,17-20,84
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
Literasi Membaca	Persen	22,60-25,1
Numerasi	Persen	17,21-19,71
Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Persen	10,75-10,78
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Persen	14,07-14,09
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	15,5-16,5
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	79
Tingkat Kemiskinan	Persen	15,63-16,07

URAIAN	SATUAN	2026
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen	95,05
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Persen	36,75
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen	1,01
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen	3,82
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Persen	
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	58,06-58,14
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	0,52-0,52
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Tingkat Penguasaan IPTEK		
Indeks Daya Saing Daerah	Persen	
Indeks Inovasi Daerah	Persen	26,94
Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	Persen	5,71
Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*		
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	4,7-4,84
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	10,02
Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persen	0,8
Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	1,35
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,16
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	75
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	79,43-79,51
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Indeks Pelayanan Publik	Persen	2,83-62,27
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	62,04
Indeks Integritas Nasional	Persen	62,87
Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	70,09
Persentase Desa Mandiri	Persen	0,8
Indeks Reformasi Hukum*	Persen	70,38
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	2,12
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	67,25
Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	60,15-63,4
Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota (Sister Province/Sister City)	Persen	63,77
Indeks Kinerja Daerah	Persen	63,8
Efektivitas kerjasama daerah	Persen	63,77
Persentase penurunan konflik SARA	Persen	62,61

URAIAN	SATUAN	2026
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	49,59-49,71
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	8,66
Pengelolaan Sampah:		
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	1,18
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	Persen	16
Ketahanan energi, air, dan pangan		
Ketahanan Energi		
Konsumsi Listrik per Kapita*	kWh	208,75
Intensitas Energi Primer*	SBM/Rp milyar	103,93
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	32,86
Ketahanan Air		
Kapasitas Air Baku*	m ³ /detik	0,57
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	27,5

Sumber : RPJMD Provinsi PBD Tahun 2025-2029

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ditujukan untuk “*Penguatan Fondasi Pembangunan Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera*”. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	67,81
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,64
3	Indeks Gini	Nilai	0,3325
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73
5	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,45
6	PDRB Per Kapita	Juta/Rupiah	68,62
7	Indeks Desa/Kampung	Nilai	0,61
8	Kontribusi pendapatan Sektor Wisata terhadap PAD	persen	64,50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	84,13
10	Indeks Risiko Bencana	Nilai	142,86
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Nilai	B
12	Rasio konektivitas	Persen	

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Target 2026
13	Indeks infrastruktur	Persen	
14	Rasio pertumbuhan PAD	Persen	17,26

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	84,13
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	25,85
10	Indeks Risiko Bencana	poin	142,86
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	
13	Rasio Penduduk	Persen	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,45
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,64
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	68,62
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73
5	Indeks Gini	angka	0,3325
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	67,81
7	Usia Harapan Hidup	tahun	67,52
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	
9	Prevalensi Stunting	Persen	17,07
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,61
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,38
12	Angka Literasi/Numerasi	Persen	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	
14	Indeks Literasi Digital	angka	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2026
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	Persen	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,47
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	
18	Tingkat Inflasi	Persen	
19	Indeks Akses Keuangan Inklusif	Persen	
20	Indeks Zakat Nasional	Persen	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,68
4	Indeks Integritas Nasional	angka	
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	
8	Indeks Rasa Aman	angka	
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

a) Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

- 1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
- 3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
- 4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- 7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- 8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2026 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi :

- a) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2026, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Raja Ampat menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting. Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional.

Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- f) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- g) Program Pemberdayaan Sosial;
- h) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- i) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- j) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- k) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- l) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas. Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM. Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial,

kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c) Dukungan terhadap penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Kabupaten Raja Ampat, dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menerapkan strategi nasional penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :
 - Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 - Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun terakhir RPD Tahun 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM.
2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Prioritas RPD

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan pentahapan Tahun 2026 untuk mewujudkan Masyarakat yang Semakin Sejahtera Menuju Raja Ampat Makmur dan Berbagi. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat. Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi dengan nomenklatur program sesuai ketentuan.

Program unggulan merupakan program strategis kepala daerah yang terpilih dan dirumuskan berdasarkan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta permasalahan utama daerah. Perumusan program unggulan juga mempertimbangkan berbagai program prioritas pemerintah pusat dan Provinsi Papua Barat Daya. Program unggulan ini akan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat setiap tahun yang harus dituangkan dan dijalankan dalam setiap rencana tahunan daerah maupun perangkat daerah. Adapun program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut:

1) Akses pendidikan berkualitas :

- Pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama di daerah 3 TP (fokus pada SMP dan SMA secara bertahap)
- Reaktivasi sekolah berpola asrama (SMP/SMA di Folley, Yenanas, Wawarbomi)
- Penyediaan makanan bergizi bergizi bagi pelajar (terintegrasi dengan MBG)
- Sekolah gratis (PAUD-SLTA)
- Beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu)
- Insentif guru daerah terpencil termasuk penyediaan fasilitas rumah guru (PNS dan Non PNS) dan program guru dari kampung sendiri.
- Perumusan kurikulum lokal yang berorientasi pada kelestarian budaya, lingkungan, dan mendukung sektor pariwisata (termasuk pendidikan Bahasa Inggris)
- Penguatan pendidikan vokasi.

2) Layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas :

- Peningkatan kualitas layanan RSUD
 - Pengembangan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dادر) di setiap distrik
 - Penyediaan dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan
 - Pengadaan ambulance laut (Mobile clinic)
 - Membangun sentra layanan kesehatan di spot wisata utama
 - Percepatan penurunan dan pencegahan stunting dan gizi buruk
 - Percepatan pencegahan dan penurunan penyakit ATM (AIDS, TBS dan Malaria).
- 3) Pariwisata berkelanjutan
- Pengembangan kawasan wisata baru yang berkelanjutan (kota baru)
 - Mendorong pembangunan bandara baru
 - Beautifikasi Kota Waisai sebagai gerbang wisata Raja Ampat
 - Pengembangan Kalender Wisata Raja Ampat
 - Pengembangan dan Penataan destinasi wisata unggulan
 - Pengelolaan sampah (Raja Ampat bebas dan bersih sampah)
 - Evaluasi dan perumusan kebijakan sector pariwisata dalam rangka peningkatan PAD.
- 4) Produktivitas ekonomi kerakyatan
- Revitalisasi pasar rakyat
 - Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih
 - Pemberdayaan BUMkam, UMKM dan industri kecil melalui pelatihan managerial, teknis dan finansial
 - Akses permodalan bagi UMKM dan Industri kecil
 - Fasilitas pemasaran bagi BUMkam, UMKM dan industri kecil
 - Optimalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan (TPI).
- 5) Konektivitas dan infrastruktur dasar
- Listrik masuk kampung (memastikan ketersediaan listrik di setiap kampung)
 - Peningkatan akses internet di tiap distrik dan kampung
 - Penyediaan air bersih dan sanitasi layak
 - Rumah layak huni
 - Layanan transportasi air multifungsi
 - Subsidi angkutan kapal cepat (bagi masyarakat Raja Ampat)
 - Pengembangan sea plane.
- 6) Tatakelola Pemerintahan

- Penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan WBBM
- Penerapan system e-budgeting untuk perencanaan dan pelaporan anggaran yang transparan dan akurat
- Beasiswa ASN berprestasi (S2)
- Bantuan pendidikan bagi pemuka agama (S2)
- Membuka layanan aduan masyarakat (teras layanan)
- Program PETA (penataan tanah adat).

5.1.1.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026

Rincian program unggulan dapat disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap fokus program unggulan dapat disesuaikan dengan berbagai dinamika yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat selama 5 tahun ke depan. Program unggulan daerah ini telah selaras dengan program prioritas Provinsi Papua Barat Daya. Adapun keselarasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1. Keselarasan Program Unggulan Kabupaten Raja Ampat dengan Program Prioritas Provinsi Papua Barat Daya.

Prioritas Papua Barat Daya	Kabupaten Raja Ampat
Pendidikan gratis	Akses pendidikan berkualitas
Sekolah rakyat, sekolah garuda	
Kesehatan gratis	Layanan kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
Penyediaan dokter, dokter spesialis dan tunjangan profesi	
UMKM dan tenaga kerja	Produktivitas ekonomi kerakyatan
Keamanan wilayah	Tata kelola pemerintahan
Sumber daya unggul	Akses pendidikan berkualitas
Transportasi ekonomis, murah, dan aman	Akselerasi Konektivitas dan infrastruktur dasar
	Pariwisata berkelanjutan
Dukungan program makan gratis MBG	Akses pendidikan berkualitas
Koperasi desa/kelurahan merah putih	Produktivitas ekonomi kerakyatan
Penurunan angka kemiskinan dan stunting	Produktivitas ekonomi kerakyatan
Percepatan konektivitas wilayah dan Infrastruktur	Akselerasi Konektivitas dan infrastruktur dasar

5.1.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Program prioritas yang telah disusun berdasarkan pendekatan *cascading* di atas, harus mampu mendukung kegiatan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. Hal ini untuk memperjelas peran pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung prioritas kegiatan nasional. Adapun dukung kegiatan prioritas nasional yang didukung oleh program prioritas daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2. Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN.

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
1.	Penguatan Pers Dan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, Dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3.	Pengembangan Pangan Akuatik	Program Pengolahan Dan Pemasaran

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
	(Blue Food)	Hasil Perikanan
4.	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5	Pengembangan Pangan Lokal Dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Peningkatan Penyediaan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
8	Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
9	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
10	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
11	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12	Penyediaan Dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, Dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Umkm
14	Penguatan Ekonomi Dan Industri Digital Serta Sektor Strategis Lainnya	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Program Pengembangan UMKM
15	Pengelolaan Susut Dan Sisa Pangan	Program Pengelolaan Persampahan
16	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses Dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
17	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Sungai Dan Danau	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
18	Perubahan Perilaku Dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
19	Peningkatan Pengumpulan Dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu Di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
20	Pengembangan Industri Garam Dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
21	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Kelistrikan Dan Digitalisasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
22	Pengembangan Dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
23	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
24	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
25	Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dan Madrasah Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
26	Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
27	Pembangunan Dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
30	Peningkatan Fungsi Intermediasi Dan Layanan Pemanfaatan Iptek Dan Inovasi	Program riset dan inovasi daerah
31	Penurunan Kematian Ibu Dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32	Pencegahan Dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
33	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
34	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
35	Pemberian Makanan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita	Program Pengelolaan Pendidikan
36	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
37	Eliminasi Penyakit Kusta Dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
38	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak Dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset Dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
42	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
43	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif Dan Subsidi Tepat Sasaran Melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
44	Peningkatan Daya Saing Melalui Kartu Usaha Produktif	Program Pengembangan Umkm
45	Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Pengembangan Umkm
46	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi Dengan PSU	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
47	Pemenuhan Layanan Dasar Dan Infrastruktur Desa	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
48	Pencegahan Tidak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
49	Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
51	Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	
52	Penguatan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
53	Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan	Program Pengembangan Kebudayaan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
	Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	
54	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir Dan Laut	Program Penanggulangan Bencana
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Adapun Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.2. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan					Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				201.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				105.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan di semua jenjang	Persentase pemenuhan SPM bidang pendidikan	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase anak usia 5-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Presentase Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Presentase Anak Usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				500.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Presentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				900.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Persen			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				800.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				98.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				192.768.819.800,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan ibu hamil	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase bayi yang mencapai target imunisasi dasar lengkap	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase DM dalam pengendalian	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase pengobatan standar kasus malaria positif	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan JKN	Persen			Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase faskes yang terpenuhi Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar	Persen			Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan terhadap populasi	Persen			Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga medis terhadap populasi	Persen			Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				340.000.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusisediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				150.000.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kampung mencapai target sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Persen			Dinas Kesehatan
	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen			Dinas Kesehatan
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN				100.000.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya akredetasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persen			Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA-Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat				3.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
					Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT-Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat				14.000.000.000,00	Rsud Raja Ampat
					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN-Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat				8.000.000.000,00	Rsud Raja Ampat
					Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya jaringan irigasi yang baik	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya bangunan pengendali bencana yang berkualitas	Persentase kawasan rawan banjir yang terlindungi	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM perpipaan	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana persampahan	Persentase TPA/TPST regional dalam kondisi baik	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				7.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya jaringan jalan yang dilengkapi jaringan drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase Konstruksi Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Lingkungan yang Tertata Bangunan dan Lingkungan	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas jaringan jalan sesuai standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				150.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
					Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkotaan	Persen			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.900.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Persentase korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persen			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
	Persentase korban relokasi program pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persen			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh (10-15 Ha) yang ditangani	Persen			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya ketersediaan permukiman layak huni	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persen			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				5.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.000.000.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.000.000.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan	Persen			Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				125.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.900.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				20.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			4.800.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-			850.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Persen			Dinas Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen			Dinas Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen			Dinas Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen			Dinas Sosial
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen			Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-			1.000.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen			Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen			Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen			Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen			Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-			5.000.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen			Dinas Sosial
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen			Dinas Sosial
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen			Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-			600.000.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya penanganan bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen			Dinas Sosial
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persen			Dinas Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen			Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				125.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase lembaga/swasta yang menyusun rencana tenaga kerja standar	Persen			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Tersalur setelah mendapat Pelatihan	Persen			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				350.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan di sektor Formal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				3.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Persen			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Puspaga yang aktif	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Fasilitas Publik Ramah Anak	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
					Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen			Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat konsumsi energi	Persen			Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	Persen			Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				105.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen			Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Urusan Pertanahan					
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				1.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	Persen			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				350.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat	Persen			
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				350.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya tatakelola tanah ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen			
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				1.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen			
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter Air Yang Memenuhi Baku Mutu	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Parameter Udara Yang Memenuhi Baku Mutu	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kampung Di Lahan Kritis Yang Terbina	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				115.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen			Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas MHA	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Pelanggaran lingkungan hidup yang terselesaikan	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Sampah dikurangi	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				2.000.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen KK	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				1.350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				800.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan sesuai standar	Persen			Dinas Pengendalian Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
PROGRAM PENATAAN DESA/KAMPUNG				500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Outcome : Meningkatnya kualitas penataan kampung	Persentase kampung yang difasilitasi penataan kampung	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Meningkatnya kualitas Kerjasama kampung	Persentase kampung yang telah melakukan kerjasama	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KAMPUNG				1.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase BUMKam aktif	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
	Persentase Aparatur Kampung dan Anggota Bamuskam yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				4.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Meningkatnya pembedayaan Lembaga adat, hukum adat, dan kemasyarakatan	Persentase Lembaga adat dan hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
	Persentase Lembaga kemasyarakatan kampung yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT				500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
		Persen			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.900.000.000,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang memenuhi standar				Dinas Perhubungan
	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi				Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi perairan	Persentase pelabuhan dan dermaga dalam kondisi baik				Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
					Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Meningkatnya akses dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan publikasi Informasi kebijakan daerah yang disebarluaskan	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				7.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan pemanfaatan aplikasi Informatika oleh Perangkat Daerah	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.100.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				75.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase usaha simpan pinjam yang dijalankan sesuai prosedur				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				150.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya koperasi yang berjalan sesuai ketentuan	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				200.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				150.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kapasitas SDM pengurus/ pengelola koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan				Dinas Koperasi Dan Ukm

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				500.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan				Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kualitas manajemen koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait manajemen modern				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				4.500.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro formal				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				150.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya kapasitas produksi UKM	persentase jumlah usaha mikro yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan pemasaran				Dinas Koperasi Dan Ukm
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI				100.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Ukm
Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				Dinas Koperasi Dan Ukm
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi total terhadap target investasi	Persen			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Pelaporan LKPM	Persentase peningkatan pelaporan LKPM	Persen			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya data dan SIPM yang dikelola	Persentase data dan SIPM yang dikelola	Persen			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.900.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				150.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Meningkatnya keberdayaan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Persen			Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen			Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				120.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan	persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen			Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				200.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data statistik oleh pihak terkait	Persentase data statistik yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Meningkatnya keamanan informasi (data) pemerintah daerah	Persentase pengelolaan persandian secara baku	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.800.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				500.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase layanan perpustakaan sesuai standar	Persen			Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				75.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen			Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				250.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen			Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				150.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen			Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				50.000.000,00	Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persen			Dinas Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Pelaku Seni Budaya yang Aktif				Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				50.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sejarah Budaya Raja Ampat yang Disebarluaskan				Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				350.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan				Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				150.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan				Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.450.000.000,00	Dinas Perikanan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				9.000.000.000,00	Dinas Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.000.000.000,00	Dinas Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton			
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				350.000.000,00	Dinas Perikanan
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh	Persen			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.000.000.000,00	Dinas Perikanan
Meningkatnya produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar kualitas	Persen			

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.100.000.000,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persen		1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang meningkat daya tariknya				
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persen		2.750.000.000,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persen		350.000.000,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persen		3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha sektor di pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi				
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen			
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen			
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen			
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen			

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya Akses masyarakat penggiat sektor pertanian Terhadap Sarana Pertanian	Persentase Jumlah masyarakat penggiat sektor pertanian yang mendapat Akses Bantuan sarana pertanian	Persen			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen			
	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen			
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen			
	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen			
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.200.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				350.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.300.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi (%)	Persen			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				100.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persen			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				750.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				250.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi promosi	Persen			
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.750.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen			

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				100.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya legalitas usaha IKM	Persentase IKM berlegalitas usaha	Persen			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				100.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Perizinan Sektor Perindustrian	Persen			
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen			
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				350.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Presentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Presentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Presentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	Persen			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				72.900.000.000,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
Meningkatnya kualitas kebijakan tata kelola organisasi daerah	Persentase PD yang difasilitasi implementasi RB	Persen	100		

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
	Persentase PD yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja	Persen	100		
Meningkatnya layanan keprotokolan	Persentase layanan kepada pimpinan sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14.700.000.000,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan	Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100		
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bantuan sosial yang tepat sasaran	Persen	100		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.400.000.000,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang dijalankan	Persen	100		
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pembangunan	Persentase kebijakan bidang pembangunan yang dijalankan	Persen	100		
Meningkatnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persen	100		
Sekretariat DPRD					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.780.000.000,00	Sekretariat Dprd
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				8.100.000.000,00	Sekretariat Dprd
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD	Tepat Waktu/tidak	Tepat waktu		
	Persentase penetapan Raperda	Persen	100		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai standar	Persen	100		
Perencanaan					

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.650.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3.000.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya sistem perencanaan dan pengendalian yang berkualitas	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100		
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra	Persen	100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4.900.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian bidang PPM	Persentase Keselarasan Renstra dengan Renja PD bidang PPM	Persen	100		
	Persentase Keselarasan program RKPD dengan Renja PD bidang PPM	Persen	100		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian	Persentase Keselarasan Renstra dengan Renja PD bidang Perekonomian	Persen	100		
	Persentase Keselarasan program RKPD dengan Renja PD bidang pekonomian	Persen	100		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan Renstra dengan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		
	Persentase Keselarasan program RKPD dengan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		
Keuangan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.700.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				184.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase alokasi anggaran sesuai ketentuan	Persen			
Meningkatnya tata Kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Persen	100		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persen			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.265.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase penatausahaan asset daerah sesuai standar	Persen			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Meningkatnya realisasi pajak daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Persen			
Meningkatnya realisasi retribusi daerah	Persentase realisasi retribusi daerah	Persen			
Meningkatnya pengawasan dan pelaporan pendapatan daerah	Persentase PD penghasil yang mendapatkan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah	Persen	100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		
Kepegawaian					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Persen			Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal baik	Persen			Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Meningkatnya penempatan ASN sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen			Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Meningkatnya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persen			Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persen			Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Penelitian dan Pengembangan					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				600.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas kajian daerah	Persentase kajian tentang permasalahan dan sektor unggulan daerah	Persen	100		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				700.000.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pendampingan PD dalam riset dan inovasi daerah	Persentase PD yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan tentang riset dan inovasi daerah	Persen	100		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.200.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				7.000.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya sistem pengawasan daerah	Persentase TLHP eksternal				
	Persentase TLHP internal				
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.750.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi		100		
	Persentase unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM				
UNSUR KEWILAYAHAN					
Kecamatan/Distrik Kota Waisai					Distrik Kota Waisai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.300.000.000,00	Distrik Kota Waisai
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Distrik Kota Waisai
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Kota Waisai
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu		100		Distrik Kota Waisai
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Kota Waisai
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan		100		Distrik Kota Waisai
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kota Waisai

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Kota Waisai
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kota Waisai
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Kota Waisai
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Kota Waisai
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung		100		Distrik Kota Waisai
Kecamatan/Distrik Misool Utara					Distrik Misool Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.000.000.000,00	Distrik Misool Utara
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Distrik Misool Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Misool Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu		100		Distrik Misool Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Misool Utara
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan		100		Distrik Misool Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Misool Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Utara

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Misool Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Misool Utara
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung		100		Distrik Misool Utara
Kecamatan/Distrik Misool Timur					Distrik Misool Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.200.000.000,00	Distrik Misool Timur
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Distrik Misool Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Misool Timur
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu		100		Distrik Misool Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Misool Timur
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan		100		Distrik Misool Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Timur
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Misool Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Timur
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Misool Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Misool Timur

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung		100		Distrik Misool Timur
Kecamatan/Distrik Misool Barat					Distrik Misool Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.200.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Misool Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Misool Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Misool Barat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Misool Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Misool Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Misool Barat
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Misool Barat
Kecamatan/Distrik Misool Selatan					Distrik Misool Selatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.000.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Misool Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Misool Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Misool Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Misool Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Misool Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Misool Selatan
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Misool Selatan
Kecamatan/Distrik Kofiau					Distrik Kofiau
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.600.000.000,00	Distrik Kofiau
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Kofiau
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Kofiau

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Kofiau
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Kofiau
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Kofiau
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kofiau
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kofiau
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kofiau
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kofiau
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Kofiau
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Kofiau
Kecamatan/Distrik Kepulauan Sembilan					Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.500.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Sembilan
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Kepulauan Sembilan
Kecamatan/Distrik Salawati Tengah					Distrik Salawati Tengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.600.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar		100		Distrik Salawati Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu		100		Distrik Salawati Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan		100		Distrik Salawati Tengah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Salawati Tengah

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Salawati Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Salawati Tengah
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung		100		Distrik Salawati Tengah
Kecamatan/Distrik Salawati Utara					Distrik Salawati Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.300.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Salawati Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Salawati Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Salawati Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Salawati Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Salawati Utara

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Salawati Utara
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Salawati Utara
Kecamatan/Distrik Salawati Barat					Distrik Salawati Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.000.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Salawati Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Salawati Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Salawati Barat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Salawati Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Salawati Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Salawati Barat
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Salawati Barat

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Kecamatan/Distrik Batanta Selatan					Distrik Batanta Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.400.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Batanta Selatan
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Batanta Selatan
Kecamatan/Distrik Batanta Utara					Distrik Batanta Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.200.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Batanta Utara

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Batanta Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Batanta Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Batanta Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Batanta Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Batanta Utara
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Batanta Utara
Kecamatan/Distrik Waigeo Barat Daratan					Distrik Waigeo Barat Daratan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.000.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Daratan
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Daratan
Kecamatan/Distrik Waigeo Barat Kepulauan					Distrik Waigeo Barat Kepulauan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.400.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Waigeo Barat Kepulauan
Kecamatan/Distrik Meos Mansar					Distrik Meos Mansar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.300.000.000,00	Distrik Meos Mansar
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Meos Mansar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Meos Mansar
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Meos Mansar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Meos Mansar
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Meos Mansar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Meos Mansar
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Meos Mansar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Meos Mansar

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Meos Mansar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Meos Mansar
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Meos Mansar
Kecamatan/Distrik Waigeo Selatan					Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.100.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Waigeo Selatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Waigeo Selatan
Kecamatan/Distrik Teluk Mayalibit					Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.800.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Teluk Mayalibit
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Teluk Mayalibit
Kecamatan/Distrik Tiplot Mayalibit					Distrik Tiplol Mayalibit

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.000.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Tiplol Mayalibit
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Tiplol Mayalibit
Kecamatan/Distrik Waigeo Timur					Distrik Waigeo Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.600.000.000,00	Distrik Waigeo Timur
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Waigeo Timur

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Waigeo Timur
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Timur
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Timur
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Waigeo Timur
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Waigeo Timur
Kecamatan/Distrik Wawarboni					Distrik Wawarboni
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.300.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Wawarboni
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Wawarboni
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Wawarboni

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Wawarboni
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Wawarboni
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Wawarboni
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Wawarboni
Kecamatan/Distrik Waigeo Utara					Distrik Waigeo Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.700.000.000,00	Distrik Waigeo Utara
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Waigeo Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Waigeo Utara
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Utara
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Waigeo Utara

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Waigeo Utara
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Waigeo Utara
Kecamatan/Distrik Supnin					Distrik Supnin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.800.000.000,00	Distrik Supnin
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Supnin
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Supnin
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Supnin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Supnin
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Supnin
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Supnin
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Supnin
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Supnin
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Supnin
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Supnin

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Supnin
Kecamatan/Distrik Ayau					Distrik Ayau
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.300.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Ayau
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Ayau
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Ayau
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti		100		Distrik Ayau
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Ayau
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Ayau
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Ayau
Kecamatan/Distrik Kepulauan Ayau					Distrik Kepulauan Ayau

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.100.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik yang tepat waktu	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase difasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi bidang tantribum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000,00	Distrik Kepulauan Ayau
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	Persentase kampung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kampung	Persen	100		Distrik Kepulauan Ayau
UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN					
Pengelolaan Perbatasan			100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.700.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				1.700.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebijakan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Aksi Pengelola Perbatasan yang sesuai standar	Persen	100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Meningkatnya Koordinasi Dan Pengawasan Kawasan Perbatasan	Persentase Keselarasan Program Dalam Rencana Aksi dengan Program-Program PD/K/L	Persen	100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Meningkatnya Kualitas Monitoring Dan Evaluasi Program-Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Hasil Monev Program-Program Kegiatan yang ditindak lanjuti	Persen	100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.700.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kinerja internal OPD	Persentase capaian program rutin sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.200.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				800.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				100.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik

Bidang Urusan/Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Rp.)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				150.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				400.000.000,00	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kualitas pencegahan potensi konflik sosial	Persentase kebijakan pencegahan potensi konflik sosial yang dilaksanakan	Persen	100		Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				1.414.253.819.800,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176ISJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat. Adapun penetapan target IUP pada tahun 2026 adalah sebagaimana pada tabel 6.1.

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	67,81
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,64
3	Indeks Gini	Nilai	0,3325
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,73
5	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,45
6	PDRB Per Kapita	Juta/Rupiah	68,62
7	Indeks Desa/Kampung	Nilai	0,61
8	Kontribusi pendapatan Sektor Wisata terhadap PAD	persen	64,50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	84,13
10	Indeks Risiko Bencana	Nilai	142,86
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Nilai	B
12	Rasio konektivitas	Persen	
13	Indeks infrastruktur	Persen	
14	Rasio pertumbuhan PAD	Persen	17,26

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan Provinsi Papua Barat Daya serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 menjadi pedoman untuk Menyusun (KUA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2029 untuk pelaksanaan Perencanaan Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat untuk periode 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi

sumberdaya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2026 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

BUPATI RAJA AMPAT

ORIDEKO IRIANO BUDRAM, S.IP., MM., M.Ec.Dev